

**PENGARUH BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**ALFIRA ZALZABILA**

18 0401 0040

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**PENGARUH BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA  
LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**ALFIRA ZALZABILA**

18 0401 0040

**Pembimbing:**

**Hardianti Yusuf, S.E., Sy. M.E**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfira Zalzabila

Nim 18 0401 0040

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



**Alfira Zalzabila**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengaruh Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo ditulis oleh Alfira Zalzabila Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0401 0040, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 Miladiyah yang bertepatan dengan 07 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 07 November 2022

### TIM PENGUJI

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H.               | Ketua Sidang      |
| 2. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang |
| 3. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M         | Penguji I         |
| 4. Jibria Ratna Yasir, S.E., M.Si       | Penguji II        |
| 5. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.       | Pembimbing        |

### Mengetahui :

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Takdir, S.H., M.H.  
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



Dr. Fasika, S.EI., M.EI.  
NIP. 19810213 200604 2 002



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد)

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut- pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palopo”** tepat waktu dan dengan hasil yang sesuai dengan harapan

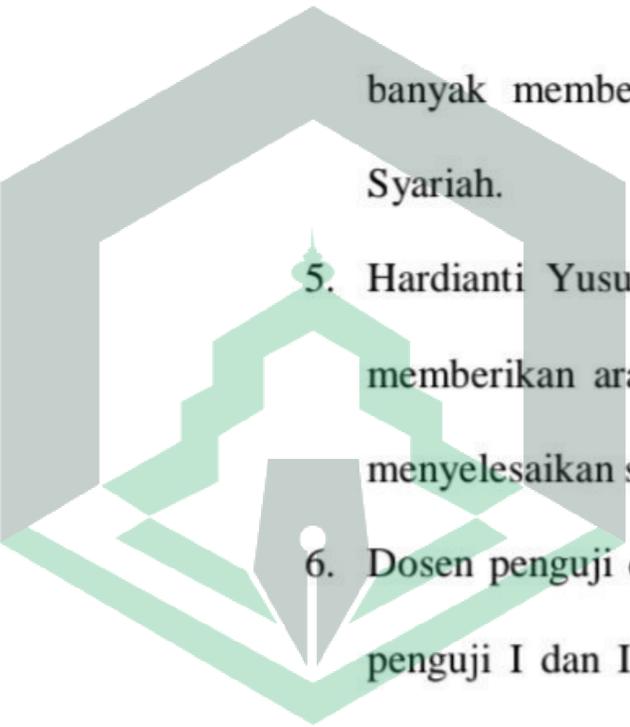
Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menghadapi banyak rintangan dan kesulitan. Namun, dengan pertolongan Allah *Subhanahu Wata'ala*, ketekunan dan ketabahan penulis yang disertai dengan dukungan dan do'a dari berbagai pihak sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis ingin menyampaikan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ismil dan Ibu Darnawati yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan penuh baik secara moril maupun materil bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga saat ini. Sungguh penulis sadar bahwa penulis tidak mampu membalas

semua itu. Hanya do"aa yang dapat penulis berikan kepada mereka semoga senantiasa berada dalam rahmay dan lindungan Allah *Subhanahu Wata"ala*.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Muhaemin, M.A yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Hj. Ramlah, M., MM selaku mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Dr. Takdir, S.H., M.H., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Ilham, S.Ag.,M.A., yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, beserta Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah yaitu Kadir Arno, SE., Sy. M.Si., beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini



banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.

5. Hardianti Yusuf, SE. Sy.,M.E selaku Pembimbing Utama, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dosen penguji dalam hal ini Ibu Muzayyanah Jabani, S.T., M.M selaku penguji I dan Ibu Jibria Ratna Yasir, SE.,M.Si selaku penguji II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

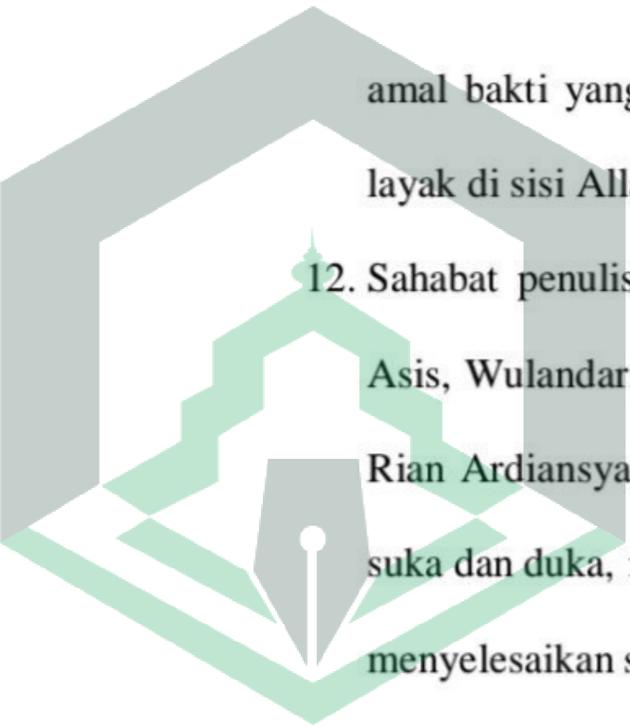
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo. Dalam hal ini Bapak Madehang,S.Ag., M.Pd beserta segenap Staf yang telah membantu dan memberikan peluang penulis dalam mengumpulkan buku-buku serta melayani penulis dengan baik untuk keperluan studi kepustakaan dan penulisan skripsi ini dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang membantu kelancaraan pegurusan berkas-berkas skripsi ini sampai meraih gelar SE.

8. Dosen Penasehat Akademik, dalam hal ini Bapak Ilham, S.Ag., M.A.

9. Kepala Dinas Bappeda dan staff, yang senantiasa membantu peneliti dalam proses penelitian.

10. Segenap Keluarga Besar yang telah membantu dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian studi.

11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (khususnya kelas EKS B), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan



amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

12. Sahabat penulis Nur Hayani, Sulistia S, Sakinah Haskar, Sry Wahyuni Asis, Wulandari, Nurjayanti Bahar, Nurfadila, Rini Astuti, Abdul Karim, Rian Ardiansyah dan Zul Fahmi yang telah menemani penulis melewati suka dan duka, memberikan support penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada Edi Kasmada yang telah banyak memberikan support, saran, motivasi, dukungan serta do'a sehingga dalam penelitian dan penyelesaian studi ini dapat terselesaikan.

14. Teman-teman rekan se-posko KKN-KS Angkatan-XL Desa Kalpataru yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

15. Kepada diri saya, yang telah percaya bahwa saya bisa melakukan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Teriring do'a, semoga segala amal kebaikan serta keikhlasan dukungan mereka bernilai pahala di sisi Allah *Subhanahu Wata'ala* serta senantiasa dalam Rahmat dan lindungan-Nya *Aamiin Allahumma Aamiin*.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah *Subhanahu Wata'ala*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan

ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud bakti penulis yang dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan serta bernilai ibadah di sisi-Nya

*Aamiin Allahimma Aamiin.*



Palopo, 28 Juni 2022

**ALEIRA ZALZABILA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi adalah mengalihkan suatu tulisan ke dalam aksara misalnya, dari aksara Arab ke Aksara Latin. Berikut ini adalah surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan ye
ض	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ط	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ظ	T	T	Te dengan titik di bawah
ع	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
اَ	'Ain	'	Koma terbalik
اِ	Gain	G	Ge
اِ	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
ا	<i>Fathah</i>	A	أ
إ	<i>Kasrah</i>	I	إ
أ	<i>Dammah</i>	U	أ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ   اِ   اِي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
اُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

مَاتَ : māta  
 رَمَى : rāmā  
 قِيلَ : qīla  
 يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

أَلْحِكْمَةِ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّئْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمًا	: <i>nu'ima</i>
عِزًّا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (أل) (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْع : *al-nau'*

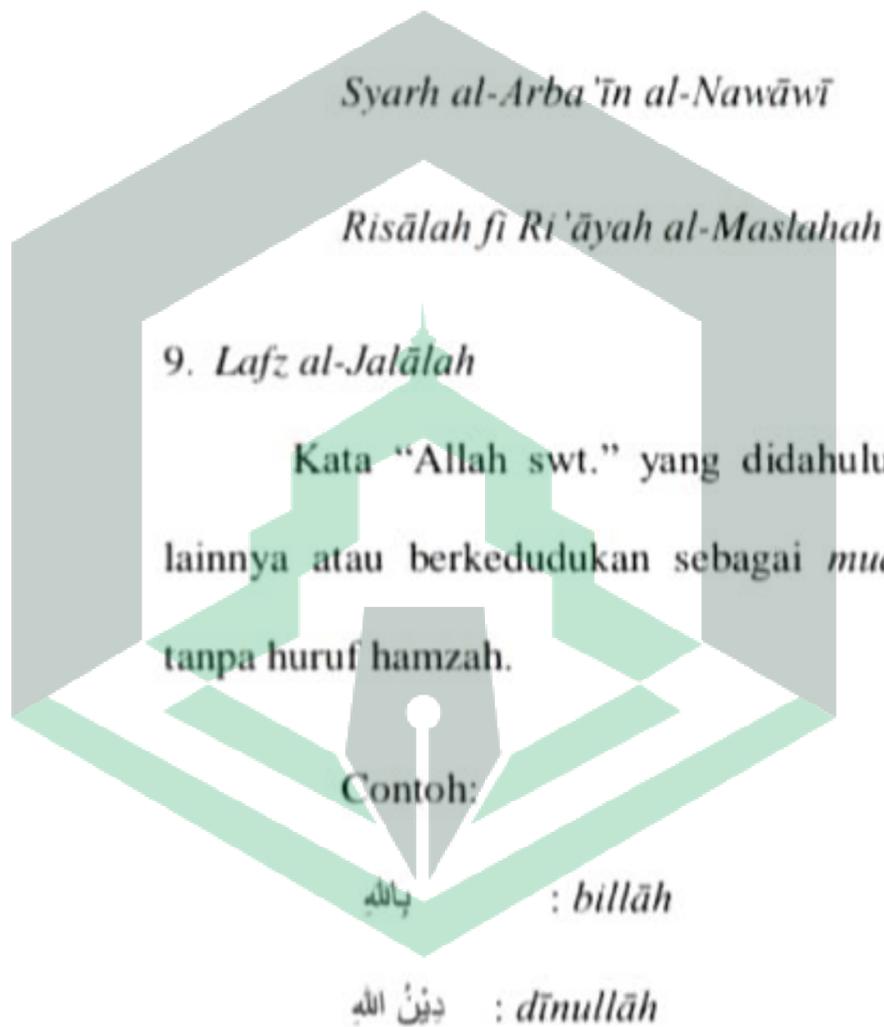
سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:



Kata "Allah swt." yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Nasr Hāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmīd (bukan, Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

### 11. Singkatan

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>SallAllah swt.u 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
ra	: <i>RadiAllah swt.u 'anha</i>
H	: Hijriyah
M	: Masehi
No.	: Nomor
Vol	: Volume
QS.	: Qur'an Surah
HR	: Hadist Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
B. Landasan Teori .....	13
C. Kerangka Pikir.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Definisi Operasional Variabel .....	36
C. Populasi dan Sampel.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>44</b>
A. Hasil Penelitian.....	44
B. Pembahasan.....	57
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
A. Simpulan .....	61
B. Saran .....	62

## DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAK



**Alfira Zalzabila, 2022.** *“Pengaruh Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hardianti Yusuf

Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi di hitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Adanya peran pemerintah tercermin lewat belanja pemerintah guna meningkatkan pembangunan ekonomi maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palopo. Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja tidak langsung dan belanja langsung secara parsial dan simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik yang terdiri uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Serta uji hipotesis yang terdiri uji t, uji f dan uji koefisien determinasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Tidak Langsung Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo. Sedangkan belanja langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Secara simultan antara variabel belanja tidak langsung dan belanja langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo.

**Kata kunci :** Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Pertumbuhan Ekonomi

## **ABSTRACT**



**Alfira Zalzabila, 2022.** *"The Influence of Indirect Spending and Direct Spending on Economic Growth in Palopo City". Thesis of Islamic Economics Study Program Faculty of Economics and Islamic Business Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hardianti Yusuf*

*Economic growth is one of the macro indicators to see the real economic performance in an area. The rate of economic growth is calculated based on changes in GRDP on the basis of constant prices for the year in question against the previous year. Economic growth can be seen from the increase in the number of goods and services produced by all economic business fields in an area over a period of one year. The role of the government through government spending is to increase economic development and improve the welfare of the people in Palopo City. This study discusses the effect of indirect spending and direct spending on economic growth in the city of Palopo. This study aims to analyze the effect of indirect and direct spending partially and simultaneously on economic growth in Palopo City.*

*This type of research is quantitative research with data analysis techniques used in this study, namely classical assumption test consisting of normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test and autocorrelation test. As well as hypothesis testing consisting of t test, f test and coefficient of determination test.*

*The results of this study indicate that partially indirect spending has an effect on economic growth in Palopo City. Meanwhile, direct expenditure has no effect on economic growth in Palopo City. Simultaneously, indirect and direct expenditure variables affect the economic growth of Palopo City.*

**Keywords:** *Direct Shopping, Indirect Shopping, Economic Growth*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan usaha-usaha guna meningkatkan taraf hidup suku bangsa yang selalu diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Secara umum pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, menjaga keseimbangan ekonomi negara dan pendistribusian pendapatan yang merata.<sup>1</sup>

Bonaraja Purba menjelaskan bahwa dimensi tujuan pembangunan menjelaskan urutan tahapan evolusi pengukuran ekonomi pembangunan, dari awal kemunculan teori ekonomi pembangunan yang mengukur terjadinya pembangunan dilihat dari tingkat *output* melalui Produk Domestik Bruto (PDB) berkembang menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengatasi kemiskinan dengan paradigma entitlement dan kapabilitas, kebebasan hingga pembangunan berkelanjutan”.<sup>2</sup>

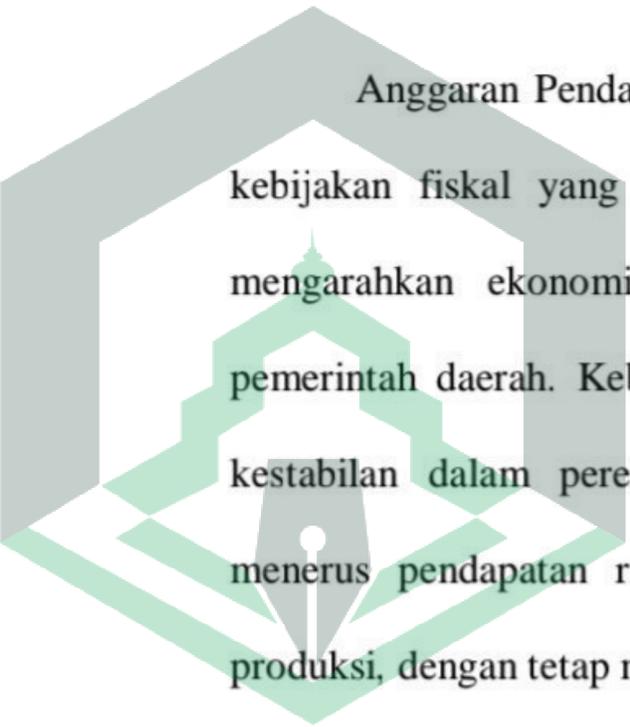
Fauziah Aqmarina menjelaskan bahwa anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian daerah serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sudirman, and M. Alhudhori. "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi." *EKONOMIS: Journal of Economics and Business* 2.1 (2018): 81-91.

<sup>2</sup> Bonaraja Purba, et al. *Ekonomi Pembangunan*. (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021). 12

<sup>3</sup> Dr. Bevaola Kusumasari, "Akuntabilitas", Edisi 3 (Jakarta: LAN, 2019). 7-8



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang merujuk pada kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengarahkan ekonomi suatu daerah melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Kebijakan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian daerah dengan meningkatkan secara terus-menerus pendapatan riil suatu daerah pada laju pertumbuhan, faktor-faktor produksi, dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 16, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah (Perda). Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

Belanja daerah berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 terdiri atas: belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan

---

<sup>4</sup> Fauziah Aqmarina, and Imahda Khoiri Furqon. "Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19." (2020).

belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.<sup>6</sup> Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kebijakan belanja pemerintah diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>5</sup>

Pengeluaran Pemerintah memiliki peran dalam Pertumbuhan Ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan mendorong meningkatnya perekonomian. Misalnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan memperkecil kemiskinan.<sup>8</sup>

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi di hitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang

<sup>5</sup> Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo, *Klasifikasi Belanja Daerah*, (Palopo: BKAD, 2019) .15-18

<sup>8</sup> Robert Lucas, *Teori Pertumbuhan Endogen*, Edisi:2 (Yogyakarta: Balai Pustaka, 2018).23.

bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah kondisi utama untuk kelangsungan ekonomi, karena masyarakat yang terus bertambah maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Untuk itu dibutuhkan modal dan sumber pembiayaan sebagai faktor penting dalam suatu proses pertumbuhan ekonomi yang diaktualisasi dalam bentuk sektor-sektor ekonomi di Kota Palopo, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2021 (dalam juta rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>PDRB</b>	<b>Laju Pertumbuhan PDRB</b>
2010	2.913.050	-
2011	3.328.322	14%
2012	3.690.917	11%
2013	4.181.226	13%
2014	4.748.586	14%
2015	5.351.285	13%
2016	5.886.518	10%
2017	6.514.939	11%
2018	7.285.142	12%
2019	7.942.481	9%
2020	8.025.290	1%
2021	8.714.312	9%

*Sumber : BPS Kota Palopo*

Tabel tersebut menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 17 sektor oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atas dasar harga konstan selama 10 tahun terhitung dari 2010 sampai pada tahun 2021 mengalami fluktuasi cenderung menurun nilai PDRB per kapita Palopo.<sup>9</sup>

Tabel 1.2 Belanja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2010-2021

Tahun	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
2010	Rp 221.894.100.476,00	Rp 161.769.485.639,00
2011	Rp 267.656.811.446,00	Rp 230.746.646.591,00
2012	Rp 302.918.650.833,00	Rp 222.853.409.165,00
2013	Rp 322.376.106.768,00	Rp 278.100.474.282,00
2014	Rp 372.994.344.151,00	Rp 324.803.534.545,00
2015	Rp 400.562.664.251,00	Rp 486.737.135.447,00
2016	Rp 429.944.381.674,00	Rp 719.186.393.030,00
2017	Rp 364.178.985.490,00	Rp 651.615.212.524,00
2018	Rp 458.151.129.700,00	Rp 537.284.188.500,00
2019	Rp 414.163.999.004,90	Rp 527.594.426.622,45
2020	Rp 727.073.776.201,30	Rp 207.967.903.780,89
2021	Rp 728.788.602.160,19	Rp 206.729.333.093,93

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo

Data tersebut pada tahun 2016, belanja langsung mempunyai nilai sebesar 86,97%, kemudian dalam satu tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 sebesar 97,31% , sedangkan pada belanja tidak langsung pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 97,59% kemudian pada beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yakni pada tahun 2020 sebesar 95,62%.

Adanya peran pemerintah tercermin lewat belanja pemerintah guna meningkatkan pembangunan ekonomi maupun meningkatkan kesejahteraan

<sup>9</sup> Rizky Wahyuningsih, Produk Domestik Regional Bruto Kota Palopo Menurut Lapangan Usaha, (BPS Kota Palopo:BPS Kota Palopo, 110

masyarakat di Kota Palopo. Hal ini terlihat pada tabel diatas tentang pengeluaran pemerintah dalam bentuk Belanja langsung dan Belanja tidak langsung.

Uraian tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian dengan menganalisa kondisi dan realisasi masyarakat terutama dua faktor yaitu pertumbuhan ekonomi dan belanja langsung serta belanja tidak langsung yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Palopo. Dalam hal ini peneliti mencoba menuangkan melalui penelitian dengan judul "*Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palopo.*"

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh belanja langsung dan tidak langsung Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo, dengan demikian tujuannya adalah untuk menganalisis Pengaruh belanja langsung dan tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Palopo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Apakah ada pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo ?
2. Apakah ada pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo ?
3. Apakah ada pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo. Dengan rincian sebagai berikut:

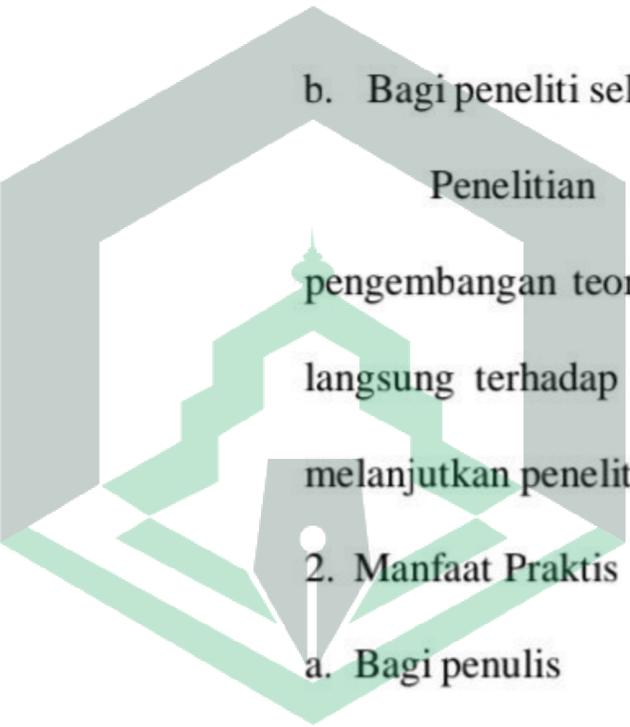
1. Untuk menganalisis pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kota palopo
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kota palopo
3. Untuk menganalisis pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi yang membaca mengenai pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kota palopo, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.



b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kota palopo, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Bagi penulis penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang belanja langsung dan belanja tidak langsung.

b. Bagi pemerintah daerah

Dapat menjadi masukan dalam mengambil kebijakan untuk mengelola belanja langsung dan belanja tidak langsung serta sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan mengenai perekonomian daerah.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyakat, serta memudahkan masyarajat untuk mencari pengetahuan berkaitan dengan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

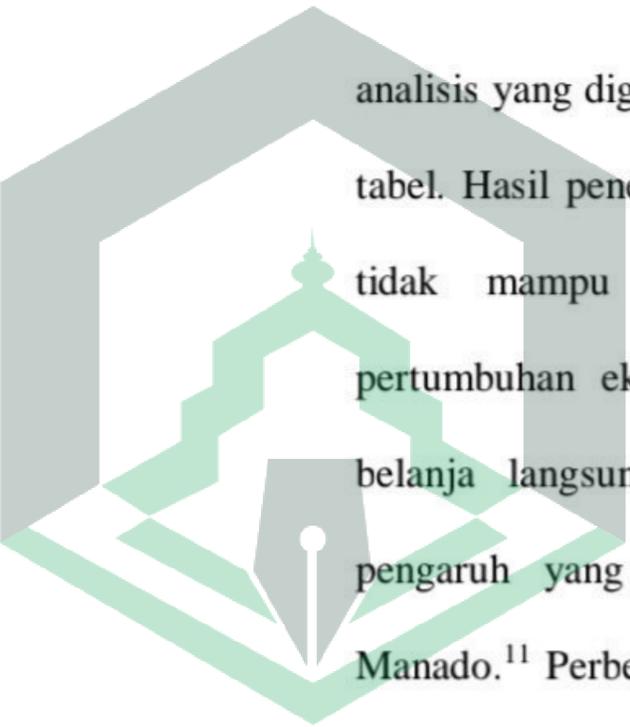
#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini memiliki landasan empiris dari penelitian terdahulu guna menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan terkait “Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo”. Sehingga penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Rahmad Mas“ud et.al dengan judul Penelitian Pengaruh Investasi dan Belanja Langsung Serta Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan<sup>10</sup> Adapun perbedaan dan persamaannya yaitu : persamaannya sama-sama menganalisis bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian.
2. Frits Junior dengan judul Penelitian Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. Metode

---

<sup>10</sup> Rahmad Mas“ud, Adi Wijaya, and Irwan Gani. "Pengaruh investasi dan belanja langsung serta belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja." *INOVASI* 17.2 (2021): 311-319.

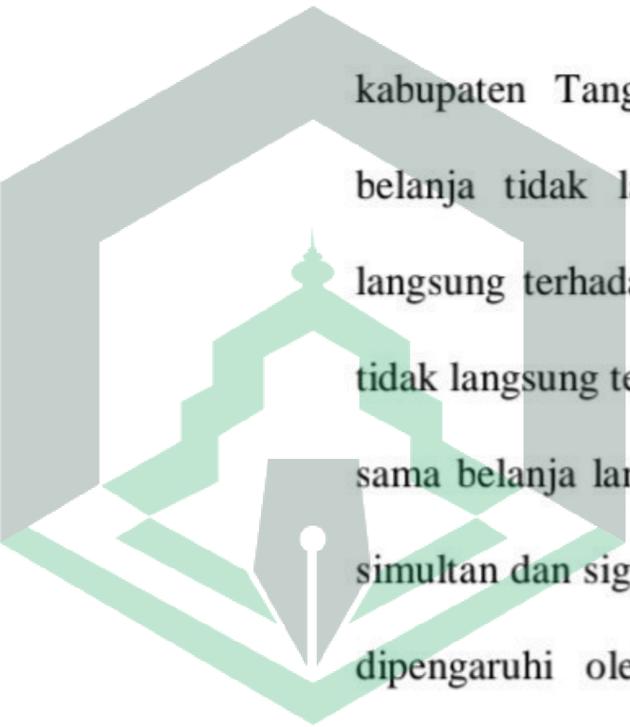


analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan analisis tabel. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel belanja langsung tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado dan secara bersama variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.<sup>11</sup> Perbedaan dan persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu : yakni persamaannya terletak pada variabel yang akan diteliti dengan menggunakan kuantitatif. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian terdahulu terlalu melebar dalam membahas variabel sedangkan peneliti variabel yang akan dibahas akan lebih spesifik lagi.

3. Moch Chamdani meneliti tentang Analisis Pengaruh Belanja Daerah (Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tangerang Tahun 2008–2014. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji T dan Uji F secara parsial bahwa tidak cukup bukti terdapat pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tangerang., Tidak cukup bukti terdapat pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tangerang. Kemudian secara bersama-sama terbukti terdapat pengaruh simultan dan signifikan belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di

---

<sup>11</sup> Frits Junior Kaontole, Debby Ch Rotinsulu, And Steeva YL Tumangkeng. "Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19.03 (2019).

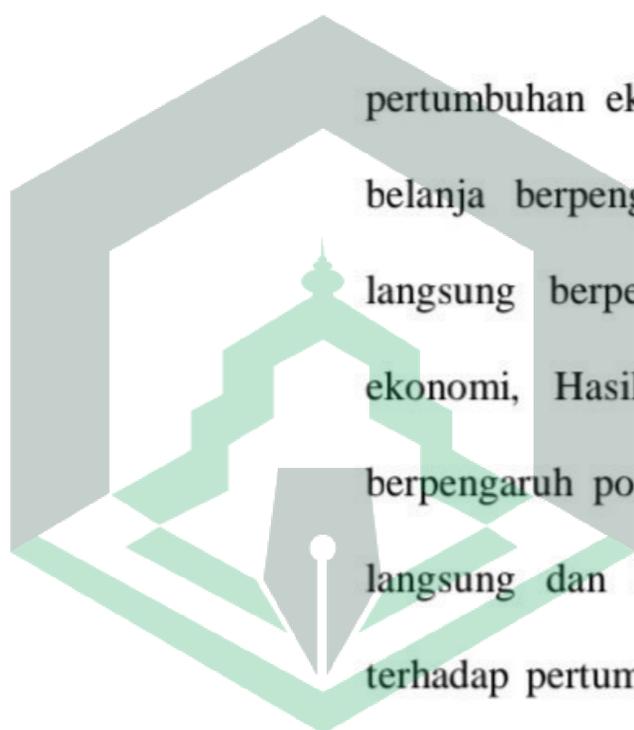


kabupaten Tangerang. Pengaruh langsung belanja langsung terhadap belanja tidak langsung sebesar 94,9 %, Pengaruh langsung belanja langsung terhadap pdrb sebesar 0,35 %, dan pengaruh langsung belanja tidak langsung terhadap PDRB sebesar 63,5 % , kemudian secara bersama-sama belanja langsung dan belanja tidak langsung memberikan pengaruh simultan dan signifikan terhadap pdrb sebesar 89,9 %, dan sisanya 10,1 % dipengaruhi oleh variable lain. Untuk mencapai nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 0 pemerintah Kabupaten Tangerang harus menutup defisit nilai konstan sebesar Rp. 132.771.632.99,-, sehingga nilai konstan menjadi positif. Kemudian untuk meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 1 digit dibutuhkan alokasi belanja daerah senilai Rp. 6.107.495,12,-.<sup>12</sup> Perbedaan dan persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu : yakni persamaannya terletak pada variabel yang akan diteliti dengan menggunakan kuantitatif. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian terdahulu terlalu melebar dalam membahas variabel sedangkan peneliti variabel yang akan dibahas akan lebih spesifik lagi.

4. Jory S Dauhan, Josep B. Kalangi, and Krest C. Tolosang meneliti tentang Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2017. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan alat bantu software EVIEWS. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap

---

<sup>12</sup> Moch Chamdani. "Analisis Pengaruh Belanja Daerah (Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tangerang Tahun 2008–2014." *Ekonomi Bisnis* 24.1 (2018): 34-54.



pertumbuhan ekonomi, Hasil ini sesuai dengan harapan teoritik bahwa belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Hasil ini sesuai dengan harapan teoritik bahwa belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. dan Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Hasil ini sesuai dengan harapan teoritik bahwa belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. <sup>13</sup>

Perbedaan dan persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu : yakni persamaannya terletak pada variabel yang akan diteliti dengan menggunakan kuantitatif. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian terdahulu terlalu melebar dalam membahas variabel sedangkan peneliti variabel yang akan dibahas akan lebih spesifik lagi

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

#### **a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik**

Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik yang pertama kali mangulas pertumbuhan ekonomi secara sistematis, inti ajaran Adam Smith merupakan supaya warga diberi kebebasan seluas-luasnya dalam memastikan aktivitas ekonomi. Bagi Smith sistem ekonomi pasar leluasa hendak menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada keadaan full employment serta menjamin pertumbuhan ekonomi hingga terjalin posisi stationer( *stationare*

---

<sup>13</sup> Dauhan, Jory S., Josep B. Kalangi, and Krest C. Tolosang. "Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2017." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20.01 (2020).

*state*). Posisi stationer terjalin apabila sumber energi alam sudah sepenuhnya termanfaatkan. Proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis terdapat 2 aspek: <sup>14</sup>

1) Pertumbuhan *Output* Total

a) Sumber Alam Tersedia

Sumber energi alam yang ada ialah wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu penduduk. Jumlah sumber energi alam yang ada ialah batas maya untuk perkembangan ekonomi, bila sumber energi belum digunakan sepenuhnya hingga jumlah penduduk yang terdapat hendak memegang peranan dalam pertumbuhan *output*.

b) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk memiliki peranan pasif dalam proses perkembangan *output*. Jumlah penduduk akan membiasakan diri dengan kebutuhan tenaga kerja dari warga.

c) Stok Benda Modal

Stok modal bagi Smith ialah faktor penciptaan yang secara aktif menentukan tingkat *output*. Kedudukannya sangat berarti dalam proses perkembangan *output*, sehingga jumlah serta jenjang perkembangan bergantung pada laju perkembangan stok modal terhadap jenjang *output* total secara langsung serta tidak langsung.

<sup>14</sup> Nurdianita Fonna. *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*. (Jakarta: Guepedia, 2019). 15

## 2) Pertumbuhan Ekonomi

Bagi Smith yang sangat menentukan jumlah penduduk pada suatu masa tertentu jenjang upah pada saat itu. Jenjang upah yang berlaku lebih tinggi daripada jenjang upah subsisten (jenjang upah yang hanya lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari), hingga jumlah penduduk akan bertambah. Smith juga menerangkan bahwa jenjang upah ditentukan oleh stok kapital serta jenjang pertumbuhan *output*. Oleh sebab itu jumlah penduduk akan bertambah ataupun menurun tergantung pada stok modal serta tingkat perkembangan ekonomi pada suatu masa tertentu.

## 2). Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

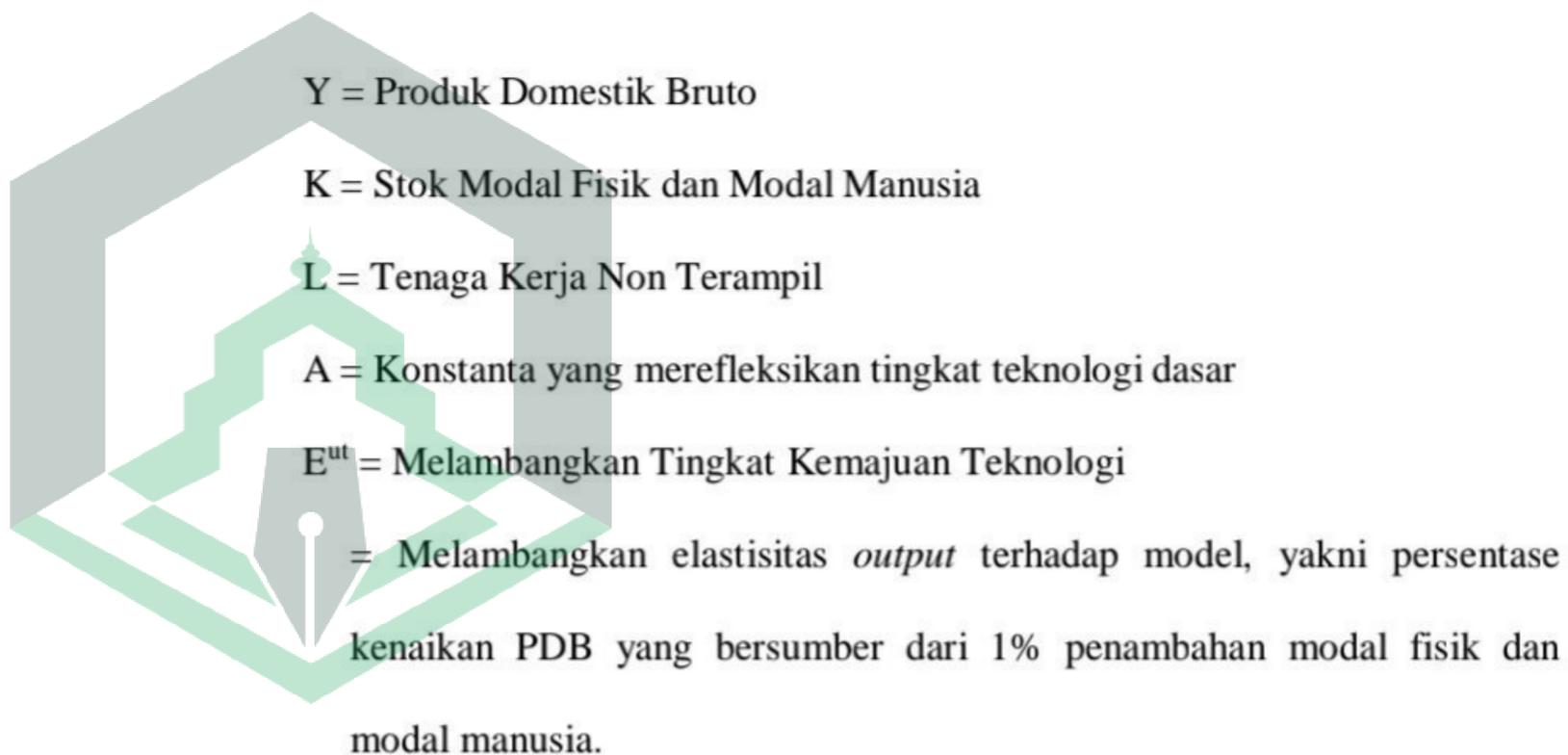
Sebagai suatu ekspansi dari teori Keynes, Teori Harrod serta Domar melihat persoalan perkembangan dari segi permintaan. Pertumbuhan ekonomi hanya berlaku apabila pengeluaran agregate melalui peningkatan investasi-bertambah terus menerus pada tingkat perkembangan yang ditentukan.

Teori pertumbuhan neo klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, ialah dari segi penawaran. Bagi teori ini yang dikembangkan oleh Abramovits Solow pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi.<sup>15</sup>

Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Solow Neo Classical Growth Model*) maka fungsi produksi agregat standar merupakan sama seperti yang digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis ialah:

$$Y = Ae^{ut} \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha} \dots\dots\dots(1)$$

<sup>15</sup> Rizal Muttaqin,. "Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam." *Maro* 1.2 (2018): 117-122.



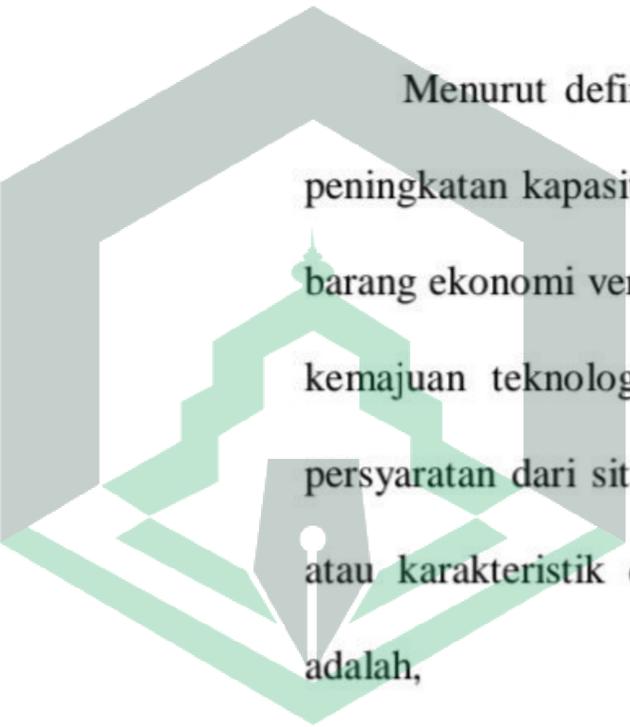
Menurut teori Pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan *output* selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 faktor yaitu: kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi.<sup>16</sup>

Kontribusi paling penting untuk pertumbuhan Ekonomi neoklasik tidak menunjukkan Tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi kontribusinya pada penggunaan teori Lakukan penyelidikan empiris Identifikasi berbagai efek nyata Faktor produksi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian Abramowitz Solow menunjukkan pertumbuhan ekonomi Amerika terutama karena Perkembangan teknologi. 80 sampai 90% dari pertumbuhan ekonomi Amerika berkembang Teknologi.<sup>17</sup>

### 3). Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern Kuznets

<sup>16</sup> Akhri Dian Suci Maulida, and Muhammad Nasir. "Analisis Peranan Sub Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan* 3.4 (2018): 687-695.

<sup>17</sup> Lina Asmara Wati, and Mimit Primyastanto. *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern: Teori dan Aplikasinya*. (Bandung: Universitas Brawijaya Press, 2018). 23



Menurut definisi Kuznets, pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah peningkatan kapasitas jangka panjang negara. Menawarkan berbagai barang ekonomi versus populasi. Kemampuan ini dicapai melalui kemajuan teknologi, kelembagaan (kelembagaan) dan ideologis berbagai persyaratan dari situasi yang ada. Profesor Kuznets memiliki 6 karakteristik atau karakteristik dari proses pertumbuhan hampir masuk Semua negara adalah,

- a) Tingkat pertumbuhan *output* per unit per kapita dan pertumbuhan penduduk Tinggi.
- b) Tingkat pertumbuhan total produktivitas faktor yang tinggi.
- c) Tingkat konversi struktural ekonomi tinggi.
- d) Derajat transformasi sosial dan ideologi tinggi.
- e) Negara cenderung negara yang telah memulai atau telah memulai mempromosikan pembangunan ekonomi Mencoba menembus bagian itu dunia lain sebagai wilayah Pemasaran dan Pengadaan Bahan Baku yang baru.
- f) Penyebaran terbatas hanya pertumbuhan ekonomi sekitar sepertiga Populasi dunia.<sup>18</sup>

## **2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai barang & jasa yang didapatkan oleh semua unit bisnis pada satu wilayah,

---

<sup>18</sup> Eva Ervani, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Majalah Ilmiah UNIKOM VOL.7*, (2018): 225.

atau merupakan jumlah semua nilai barang & jasa akhir yang didapatkan oleh semua unit bisnis pada satu wilayah.

PDRB atas dasar harga konstan menandakan nilai tambah barang & jasa yang dihitung & memakai harga dalam tahun eksklusif menjadi dasar harga konstan Kegunaan atas dasar harga konstan dipakai untuk mengetahui PDRB konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dihitung sebagai harga efektif tahun tertentu sebagai dasar.<sup>19</sup> Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

b. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah, gaji, dan surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung neto pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Kelebihan bisnis termasuk beban bunga, sewa dan keuntungan.

---

<sup>19</sup> Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Pengeluaran, (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan: Badan Pusat Statistik, 2020).8.

### c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menjumlahkan nilai akhir dalam penggunaan barang dan jasa Lokal. Dari sudut pandang penggunaan, totalnya adalah Menyediakan/ memproduksi barang dan jasa untuk konsumsi pribadi, Konsumsi sektor swasta nirlaba, konsumsi negara, Total pembentukan modal tetap (investasi), fluktuasi persediaan, ekspor neto.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini PDRB di interpretasikan menurut pendekatan produksi dalam perhitungan yang di jumlahkan ialah nilai tambah dari produksi atau value added yang diciptakan.

### 3. Keuangan Daerah

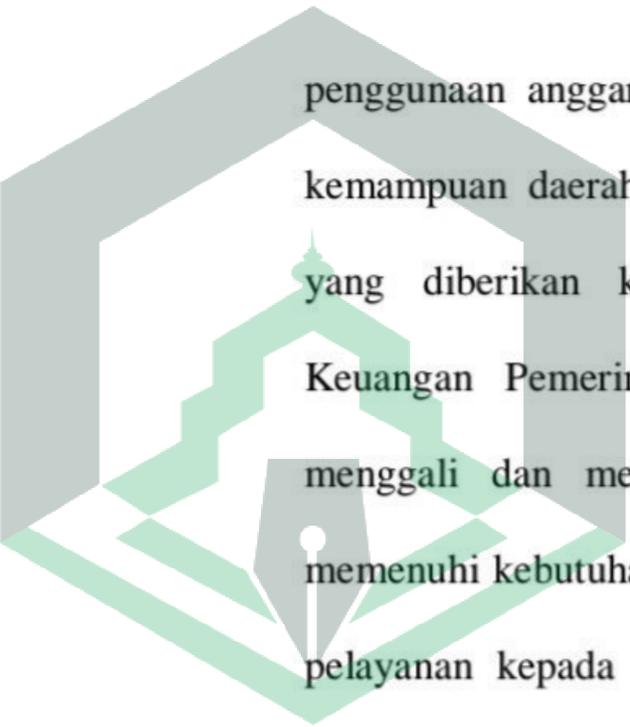
Menurut Mamesah, Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan

---

<sup>20</sup> Nugrahini Susantinah Wisnujati, et al. *Dasar Ilmu Ekonomi*. (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2022). 56



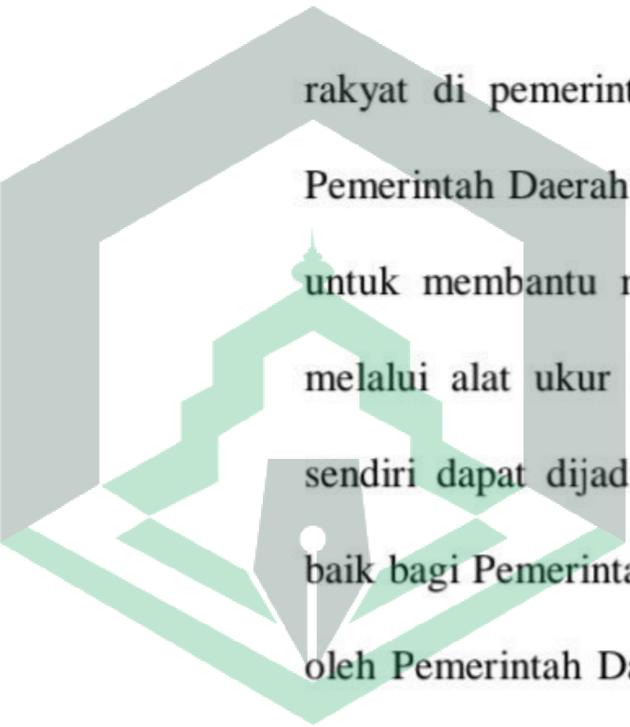
penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi

Anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil

---

<sup>19</sup> Ervani, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Majalah Ilmiah UNIKOM VOL.7*, (2018): 225.



rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri yaitu:<sup>22</sup>

- a. Kemampuan struktural organisasinya Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
- b. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

---

<sup>20</sup> Ervani, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Majalah Ilmiah UNIKOM VOL.7*, (2018): 225.

c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

d. Kemampuan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu: <sup>23</sup>

- a. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur menurut Abdul Halim:<sup>24</sup>

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

<sup>23</sup> Lina Asmara Wati, and Mimit Primyastanto. *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern: Teori dan Aplikasinya*. (Bandung: Universitas Brawijaya Press, 2018). 23

<sup>24</sup> Abdul Halim. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. (Jakarta : Salemba Empat. 2017). 76

- 
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
  - d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
  - e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi : <sup>25</sup>

a. Indikator Masukan (*Inputs*)

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

b. Indikator Proses (*Process*)

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya : ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

---

<sup>25</sup> Gahung, *Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung*, Edisi:1 (Jakarta:Pustaka Populer,2019).10.

### c. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

### d. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai

### e. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya : tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

### f. Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya : peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

## 4. Pengeluaran Pemerintah dalam Perspektif Islam

Kegiatan menambah pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu yang pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat berbeda dengan kitab-kitab agama lain, kitab suci Al-Qur'an telah menetapkan suatu kebijakan

pengeluaran yang luas untuk distribusi kekayaan berimbang diantara berbagai lapisan masyarakat.

dalam Q.S An Nisa/4:58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemanya:

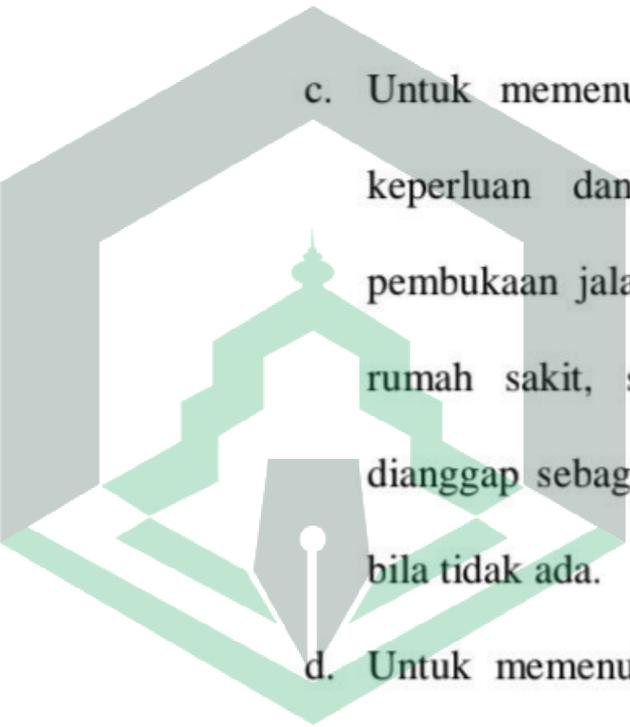
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>26</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang amanah yang diterima oleh para penguasa (pejabat) dalam menetapkan kebijakan untuk hajat orang banyak haruslah bersikap adil dan memberikan amanat kepada yang benar menerima haknya.

Setiap pemasukan yang diterima Baitul Mal akan dikeluarkan haknya melalui pengeluaran- pengeluaran, negara akan melaksanakan dan mengikuti ketentuan- ketentuann diantaranya:

- a. Untuk memenuhi pengeluaran- pengeluaran wajib bagi baitul mal semisal untuk fakir miskin, ibnu sabil, serta melaksanakan kewajiban jihad.
- b. Untuk memenuhi pengeluaran- pengeluaran wajib bagi baitul mal sebagai suatu kompensasi, semisal pengeluaran-pengeluaran untuk gaji para pegawai negeri, gaji tentara dan sebagainya.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah). 19



c. Untuk memenuhi pengeluaran- pengeluaran wajib baitul mal untuk keperluan dan kemanfaatan tertentu, selain kompensasi semisal pembukaan jalan- jalan, penggalian air, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, serta keperluan- keperluan lain yang keberadaannya dianggap sebagai masalah yang urgen, dimana ummat akan menderita, bila tidak ada.

d. Untuk memenuhi pengeluaran- pengeluaran wajib baitul mal, karena suatu keterpaksaan, semisal ada paceklik, angin taufan gempa bumi, serangan musuh, atau apa saja yang menimpa kaum muslimin.

e. Untuk melunasi hutang- hutang negara dalam angka rangka melaksanakan kewajiban negara terhadap kaum muslimin, yaitu hal- hal yang termasuk dalam salah satu dari keempat keadaan di atas atau yang menjadi cabang dari keadaankeadaan tersebut, serta keadaan apapun yang telah diwajibkan oleh syara'' atas kaum muslimin.<sup>27</sup>

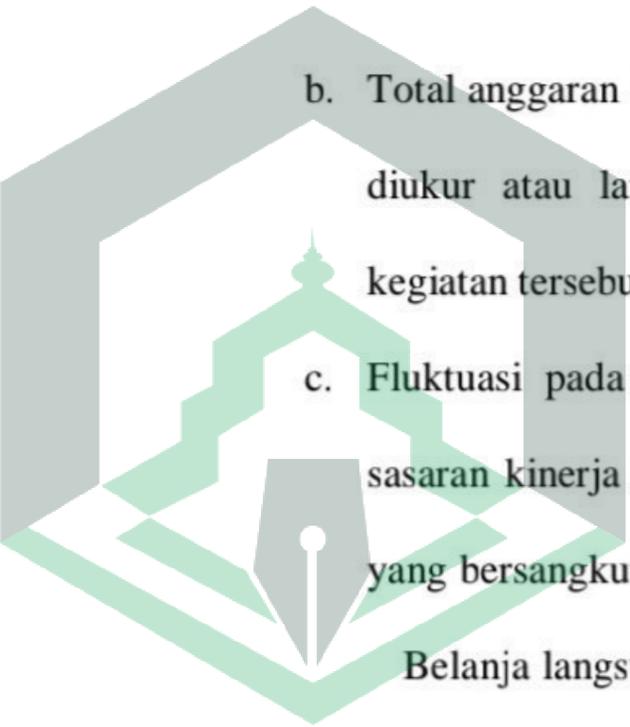
## 5. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang secara langsung dipengaruhi oleh adanya suatu program atau kegiatan.<sup>28</sup> Ciri-ciri pembelian langsung adalah sebagai berikut:

a. Anggaran untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh SKPD.

<sup>27</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2018), 254-256.

<sup>28</sup> Gahung, *Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung*, Edisi:1 (Jakarta:Pustaka Populer, 2012).19.



b. Total anggaran belanja langsung untuk suatu program atau kegiatan dapat diukur atau langsung dibandingkan dengan hasil dari program atau kegiatan tersebut.

c. Fluktuasi pada setiap jenis belanja secara langsung dipengaruhi oleh sasaran kinerja atau tingkat yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung dengan penerapan program aktivitas. Belanja langsung terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi yang di berikan dalam bentuk pendapat serta tunjangan dan pemasukan yang lain di berikan kepada pegawai negara sipil yang di resmikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai imbalan atas pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- b. Belanja Barang serta jasa merupakan suatu pengeluaran guna menampung pembelian barang serta jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau di jual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
- c. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka penyusunan modal yang sifatnya menaikkan aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat yang lebih dari satu periode akuntansi, tercantum didalamnya yakni pengeluaran untuk anggaran pemeliharaan yang

sifatnya mempertahankan atau menaikkan masa manfaat, menambah kapasitas serta mutu aset.<sup>29</sup>

Belanja Modal Menurut Para Ahli:

1) Belanja Modal Menurut Halim merupakan pengeluaran anggaran bakalperolehan aset tetap dan aset lainnya yang dimana memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.<sup>30</sup>

2) Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan, maupun pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas (12) bulan bakal digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, Gedung, dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya.<sup>31</sup>

## 6. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja pemerintah Kab/Kota yang meliputi: belanja pegawai (pendapatan pegawai Negara sipil), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja dorongan sosial, belanja untuk hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota serta desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan desa serta belanja tak terduga.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Syaiful, "Pengertian dan Perlakuan Kutansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan," *Jurnal Akuntansi* VOL. 6, ( 2018): Hal 10.

<sup>30</sup> Ahmad Halim, *Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung*, Edisi:4 (Surabaya:Pustaka Populer,2018).101.

<sup>31</sup> Juniawan, Made Ari, and Ni Putu Santi Suryantini. *Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali*. Diss. Udayana University, 2018: 78

<sup>32</sup> Teddy Desly, Veckie A, Rumat, Debby Ch. Rotinsulu, "Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung," *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* VOL. 18 (2018): Hal. 4, Doi: <https://doi.org/10.35794/jpekd.12793.18.2.2016>

#### a. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Belanja Pegawai ialah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang di berikan kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk uang represtasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepada daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang di tetapkan dalam belanja pegawai.<sup>33</sup>

#### b. Belanja Bunga

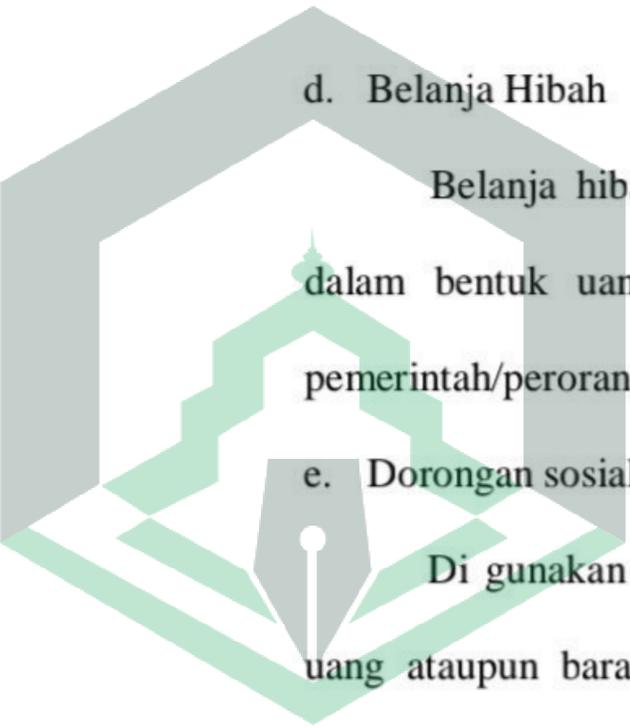
Belanja Bunga merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok hutang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek maupun jangka Panjang.

#### c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga memproduksi, menjual, mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat di jangkau masyarakat.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Erstelita Tria Ramadhani Darwis, "Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat," Jurnal Akuntansi VOL. 3, (2019):6

<sup>34</sup> Agus Heri, "APBN dan APBD", 02/01/2019, <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/APBN%20dan%20APBD-BB/Topik-5.html>, Diakses pada: 25/03/2022 8-10



d. Belanja Hibah

Belanja hibah ini digunakan untuk meganggarkan pembelian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah pusat atau kepada pemerintah/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Dorongan sosial

Di gunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang ataupun barang kepada penduduk dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah kab/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.<sup>36</sup>

h. Belanja tak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan

---

<sup>36</sup> Gahung, *Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung*, Edisi:1 (Jakarta:Pustaka Populer,2019).22.

bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.<sup>37</sup>

## **7. Perbedaan Belanja Pegawai Pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**

Dalam struktur Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL), ada yang namanya dengan Belanja Pegawai. Cukup membingungkan untuk membedakan keduanya. Untuk itu mari kita mengetahui pengertian serta contohnya dilapangan.

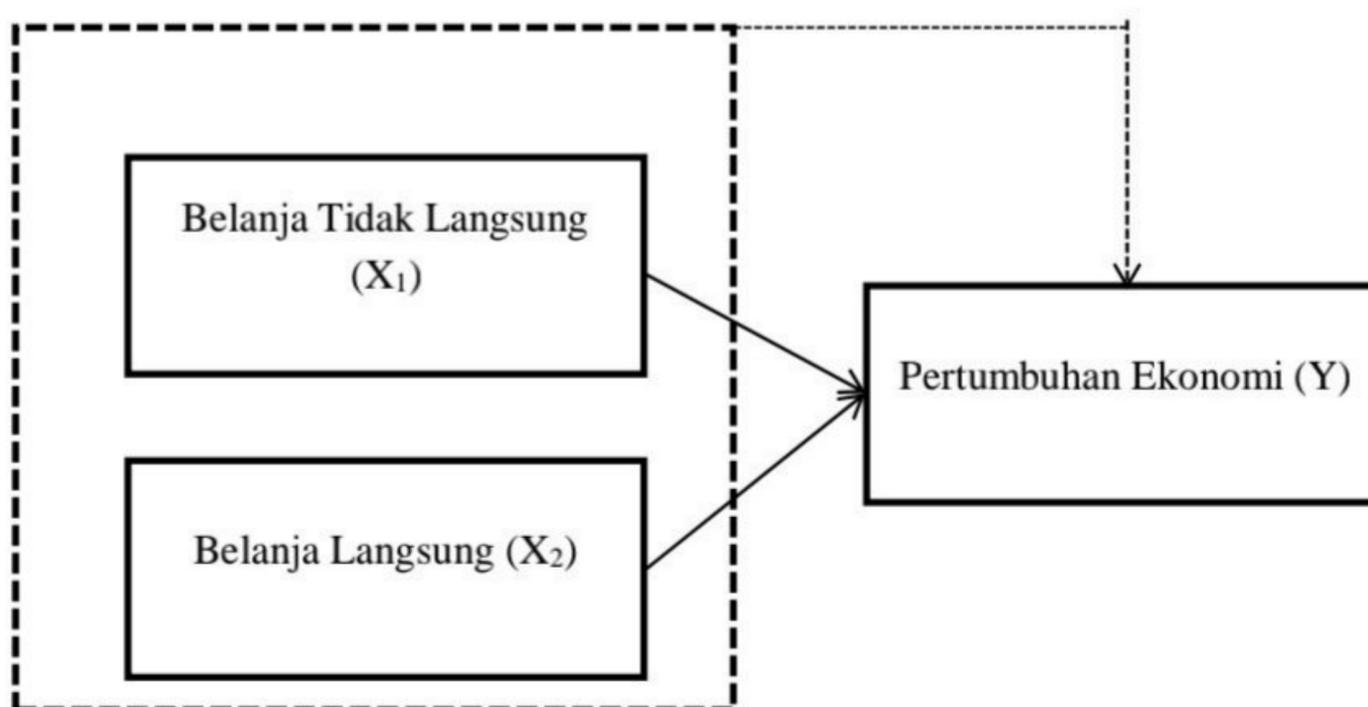
- a. Belanja Langsung (BL): Belanja yang dimana terkait langsung dengan produktivitas suatu kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi, misalnya: Belanja Pegawai Honor: ialah sesuatu yang wajib dibayarkan oleh pemerintah kepada pegawai, tetapi apabila pegawai tidak melakukan pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan. (dia bekerja / produktivitas serta berkaitan dengan tujuan organisasi)
- b. Belanja Tidak Langsung (BTL): Belanja yang dimana tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi. Contohnya: Belanja Pegawai: Gaji (Mau kerja ataupun tidak kerja tetap diterima, sehingga tidak ada produktivitas).<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Teddy Desly, Veckie A, Rumat, Debby Ch. Rotinsulu, "Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung," Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah VOL. 18 (2018): 4, Doi: <https://doi.org/10.35794/jpekd.12793.18.2.2016>.

<sup>38</sup> Andi, "Perbedaan Belanja Daerah yaitu Belanja Pegawai Langsung dan Tidak Langsung", 09/12/2015, <https://brainly.co.id/tugas/4623544#:~:text=perbedaan%20belanja%20langsung%20dan%20belanja,dengan%20produktivitas%20atau%20tujuan%20organisasi>. (Diakses pada: 02/01/2022)

### C. Kerangka Pikir

Didalam teori pertumbuhan endogen, pengeluaran pemerintah memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan mendorong meningkatnya perekonomian. Misalnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan memperkecil kemiskinan. Sehingga berdasarkan kerangka pikir tersebut tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo. Berdasarkan kajian teori tersebut, maka kerangka pemikiran yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan proposisi yang dinyatakan dalam bentuk yang dapat diuji dan yang memprediksi hubungan tertentu antara keduanya (atau lebih) variabel. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>0</sub>** : Diduga belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo

**H<sub>1</sub>** : Diduga belanja tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo

**H<sub>0</sub>** : Diduga belanja langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo

**H<sub>2</sub>** : Diduga belanja langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo

**H<sub>0</sub>** : Diduga belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo

**H<sub>3</sub>** : Diduga belanja tidak langsung dan belanja langsung berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menjelaskan hubungan yang memengaruhi dan dipengaruhi dari variabel yang akan diteliti. Sehingga jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah suatu cara yang digunakan guna menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik,<sup>39</sup> untuk itu jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif karena data yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel dinyatakan dengan angka/numerik.

#### B. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu pernyataan tentang definisi dan pengukuran variabel-variabel penelitian secara operasional. Maka dari itu, dalam rencana penelitian ini definisi operasional dari masing-masing variabel yang diteliti dapat dijelaskan sebagai berikut:

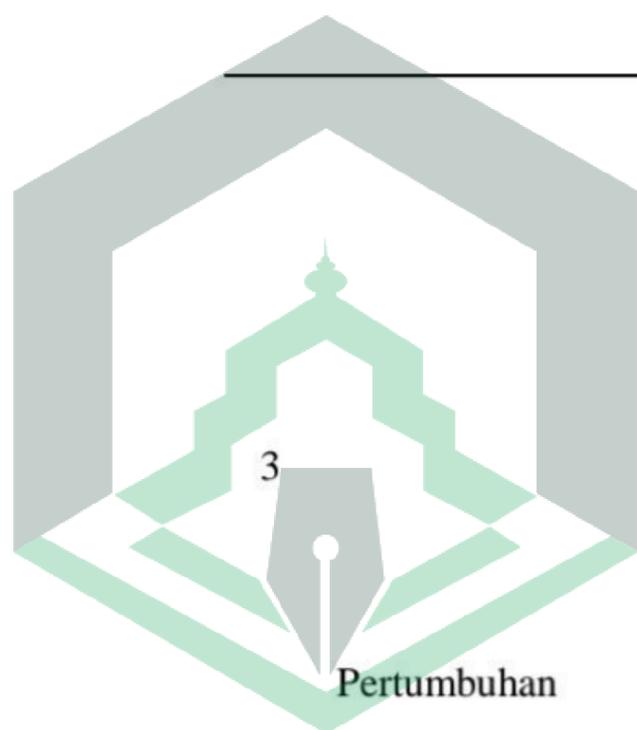
---

<sup>39</sup> Caroline, *Metode Kuantitatif*. (Jakarta: Media Sahabat Cendekia, 2019). 67

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Belanja tidak langsung (X1)	Belanja Tidak Langsung (BTL) merupakan belanja yang dimana tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi. Contohnya: Belanja Pegawai: Gaji (Mau kerja ataupun tidak kerja tetap diterima, sehingga tidak ada produktivitas) <sup>40</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Pegawai</li> <li>2. Belanja Bunga</li> <li>3. Belanja Subsidi</li> <li>4. Belanja Hibah</li> <li>5. Dorongan Sosial</li> <li>6. Belanja Bagi Hasil</li> <li>7. Bantuan Keuangan</li> <li>8. Belanja Tak terduga</li> </ol>
2	Belanja Langsung (X2)	Belanja Langsung (BL) merupakan belanja yang dimana terkait langsung dengan produktivitas suatu kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi, misalnya: Belanja Pegawai Honor: ialah sesuatu yang wajib dibayarkan oleh pemerintah kepada pegawai, tetapi apabila pegawai tidak melakukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Pegawai</li> <li>2. Belanja Barang dan Jasa</li> <li>3. Belanja Modal</li> </ol>

<sup>40</sup> Teddy Desly, Veckie A, Rumat, Debby Ch. Rotinsulu, "Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung," Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah VOL. 18 (2018): 4, Doi: <https://doi.org/10.35794/jpekd.12793.18.2.2016>.



pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan. (dia bekerja / produktivitas serta berkaitan dengan tujuan organisasi).<sup>41</sup>

Pertumbuhan  
Ekonomi (Y)

Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah laju pertumbuhan ekonomi Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan dalam satuan persen

1. Pendapatan Nasional
2. pendapatan per kapita
3. Tenaga kerja dan pengangguran
4. Kesejahteraan Masyarakat

### C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dilihat dari data belanja langsung dan belanja tidak langsung di Kota Palopo. Data sampelnya seluruh data belanja langsung dan belanja tidak langsung Kota Palopo tahun 2010-2020 yang diperoleh melalui kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Data Sekunder yang bersumber dari kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Sehingga peneliti tidak mengumpulkan

<sup>41</sup> Syaiful, "Pengertian dan Perlakuan Kutansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan," *Jurnal Akuntansi* VOL. 6, (2018): Hal 10.

data langsung dari objek yang diteliti contoh data yang dikeluarkan oleh pemerintah<sup>42</sup>

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah jenis belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap PDRB atau pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo dengan model ekonometrika.

#### **1. Uji Asumsi Klasik**

Model regresi berganda yang telah dibuat melanggar asumsi-asumsi klasik maka uji-F tidak sah (valid) secara ilmiah.<sup>43</sup> Karena itu, uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan parameter regresi langcung (*spurious regresion*) atau regresi palsu yaitu menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih yang nampaknya signifikan secara statistik tetapi pada kenyataannya tidak demikian atau tidak sebesar yang nampak pada parameter regresi yang dihasilkan.

Keberadaan parameter langsung dalam suatu penelitian mengakibatkan interpretasi terhadap parameter regresi yang dihasilkan dapat menyesatkan dan melanggar kaidak-kaidak ekonometrika.<sup>44</sup> maka hasil estimasi tidak boleh ada multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas dan haru lolos dari uji normalitas dan uji lianeritas. Uji asumsi klasik dapat dari hasil estimasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

<sup>42</sup> Dominikus Dolet Unaradjan. *Metode penelitian kuantitatif*. (Jakarta: Unika Atma Jaya Jakarta, 2019). 56

<sup>43</sup> Dyah Nirmala Arum Janie, *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS*, (Semarang: Semarang University Press, 2018). 13

<sup>44</sup> Dyah Nirmala Arum Janie, *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS*, (Semarang: Semarang University Press, 2018). 16

### a. Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hasil uji-t dan uji -F tidak valid (sah) jika variabel pengganggu atau residual tidak terdistribusi secara normal.

Banyak metode yang digunakan untuk menguji normalitas model, namun dalam penelitian ini digunakan normality residual test software gretl

1.9. Adapun kriteria untuk mengetahui normal atau tidaknya dari faktor pengganggu adalah sebagai berikut:

- 1) Bila nilai NR hitung ( $X^2_{hitung}$ ) > nilai  $X^2_{tabel}$ , maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual,  $\mu_t$  berdistribusi normal tidak dapat ditolak.

### b. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan variabel pada residual dari satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya konstan, itu disebut kesalahan kuadrat rata-rata, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Ini tidak terjadi dengan model regresi yang baik. Lakukan uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dengan melihat scatter plot.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021).80

### c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas).<sup>46</sup> Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi yaitu dengan melihat matrik korelasi antar variabel independen. Jika antar variabel independen tersebut ada korelasi yang cukup tinggi pada umumnya diatas 0,90 maka hal ini merupakan adanya indikasi multikolonieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel dependen

### d. Uji Autokorelasi

Uji ini didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Secara sederhana dapat dikatakan model klasik mengasumsikan bahwa unsur gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi digunakan uji Breusch–Godfrey seriacorelation LM (*uji lagrange multiplier*) yang dapat dijalankan dengan program / software gretl 1.9 ada tidaknya autokorelasi didasarkan pada tabel chi-square( $X_2$ ).

- 1) Apabila nilai probabilitas ( p-value ) dari  $T^*R$ - Squared  $< \alpha = 5 \%$  maka terima  $H_1$  ( terdapat autokorelasi ).
- 2) Apabila nilai probabilitas ( p-value) dari  $T^*R$  – Squared  $> \alpha = 5 \%$  maka terima  $H_0$  ( tidak terdapat autokorelasi)<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 91.

<sup>47</sup> Dyah Nirmala Arum Janie, *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS*, (Semarang: Semarang University Press, 2018). 17

## 2. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

$Y$  = variabel dependent (Pertumbuhan Ekonomi)

$X_1$  = Variabel independent (Belanja Tidak Langsung)

$X_2$  = Variabel independent (Belanja Langsung)

## 3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji t (secara simultan) dan uji F (secara parsial).

### a. Uji t (Pengujian Secara Parsial)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara parsial (individu) terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan. Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah nilai F tabel dapat dilihat pada F statistik pada  $df = n - k - 1$  atau dengan signifikansi 0,05. Atau jika nilai t hitung  $>$  t tabel.<sup>48</sup>

### b. Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Untuk melihat gambaran apakah semua variabel bebas yang ada di dalam model berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka dilakukan Uji F. Serta Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan

<sup>48</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 61

tingkat nilai signifikansi dengan nilai  $\alpha = 0,05$ . Dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara nilai signifikansi dengan nilai  $\alpha = 5\%$  dengan ketentuan sebagai berikut: <sup>49</sup>

- 1) Jika nilai  $\text{Sig} > \alpha$  maka  $H_0$  diterima
- 2) Jika nilai  $\text{Sig} < \alpha$  maka  $H_a$  diterima

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Selain itu Koefisien Determinasi menunjukkan variasi naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Nilai koefisien determinasi adalah antara satu dan nol. Apabila nilai koefisien determinasi mendekati angka satu berarti variabel independen dapat menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan sebaliknya apabila nilainya kecil atau mendekati nol berarti variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 62

<sup>50</sup> Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021). 128

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

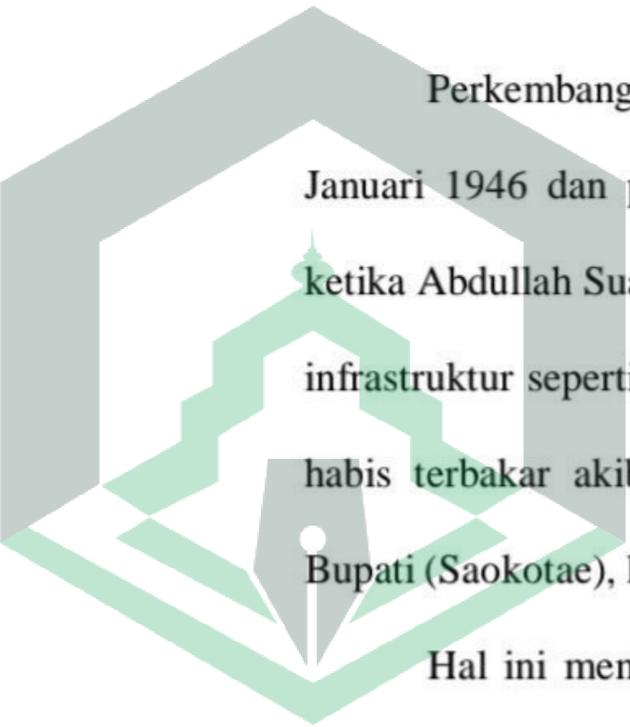
#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Palopo

###### a. Sejarah Kota Palopo

Kota Palopo ini dulunya dikenal dengan nama Ware yang diketahui dalam Epik La Galigo. Nama "Palopo" ini diperkirakan mulai digunakan sejak tahun 1604, bersamaan dengan pembangunan Masjid Jami' Tua. Kata "Palopo" ini diambil dari kata bahasa Bugis-Luwu. Artinya yang pertama adalah penganan yang terbuat dari ketan, gula merah, dan santan. Yang kedua berasal dari kata "Palopo'i", yang artinya tancapkan atau masukkan. "Palopo'i" adalah ungkapan yang diucapkan pada saat pemancangan tiang pertama pembangunan Masjid Tua. Dan arti yang ketiga adalah mengatasi.

Palopo dipilih untuk dikembangkan menjadi ibu kota Kesultanan Luwu menggantikan Amassangan di Malangke setelah Islam diterima di Luwu pada abad XVII. Perpindahan ibu kota tersebut diyakini berawal dari perang saudara yang melibatkan dua putera mahkota saat itu. Perang ini dikenal dengan Perang Utara-Selatan. Setelah terjadinya perdamaian, maka ibu kota dipindahkan ke daerah di antara wilayah utara dan selatan Kesultanan Luwu. Kota dilengkapi dengan alun-alun di depan istana, dan dibuka pula pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat. Lalebbata menjadi pusat kota kala itu.



Perkembangan Palopo mengalami pasangsurut akibat insiden 23 Januari 1946 dan pemberontakan DI/TII. Pembangunan kembali bergairah ketika Abdullah Suara menjabat Bupati Luwu kala itu. Ia membangun banyak infrastruktur seperti Masjid Agung Luwu-Palopo, kantor Bupati Luwu (yang habis terbakar akibat rusuh pilkada beberapa waktu lalu), rumah jabatan Bupati (Saokotae), hingga Pesantren Modern Datok Sulaiman.

Hal ini menjadikan Palopo sebagai ibu kota Kabupaten Luwu mulai menjadi mercusuar ekonomi di utara Sulawesi Selatan. Perlahan tetapi pasti, peningkatan status Kota Administratif (kotif) kemudian disandang di 4 Juli 1986 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi kota administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti :

- 1) Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Palopo.

- 
- 2) Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi,
  - 3) Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo;4).
  - 4) Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo;

Hasil Seminar Kota Administratip Palopo Menjadi Kota Palopo; Surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Oraganisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi; Pula di barengi oleh Aksi Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.

Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo

Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tangannya prasasti pengakuan



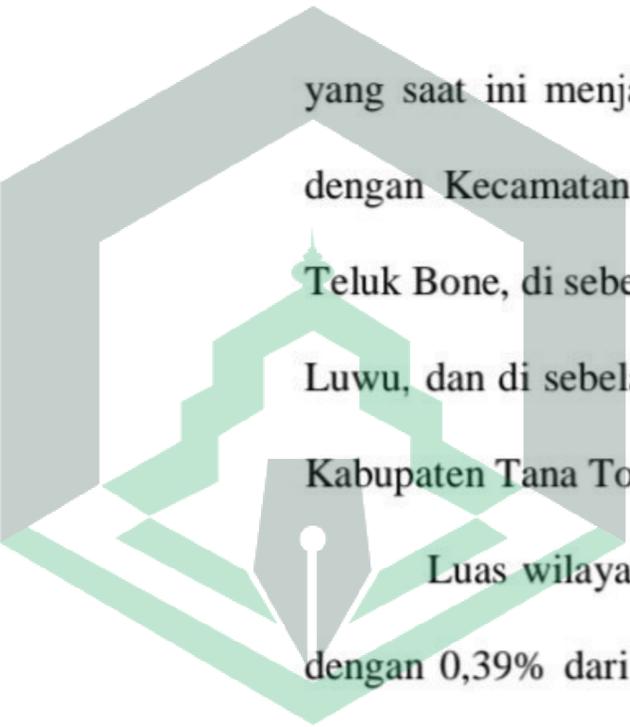
atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Palopo mencapai 8,8 persen. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi ini, Palopo tetap menjadi harapan dari warganya atas kesejahteraan yang lebih baik. Harapan ini tentu bukanlah harapan kosong belaka. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo tercatat sebagai yang terbaik ketiga di Sulawesi Selatan. Inilah doktrin “wanua mappatuwo”. Palopo dan Tana Luwu pada umumnya adalah kota tempat menggantungkan optimisme dan harapan.

#### b. Geografis

Secara Geografis, Kota Palopo terletak antara 2o53'15” – 3o04'08” Lintang Selatan dan 120o03'10” – 120o14'34” Bujur Timur. Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari kesatuan Tanah Luwu



yang saat ini menjadi empat bahagian, dimana di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 km<sup>2</sup> atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan potensi luas wilayah seperti itu, oleh Pemerintah Kota Palopo telah membagi wilayah Kota Palopo menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan pada tahun 2005.

#### c. Visi dan Misi

##### 1) Visi

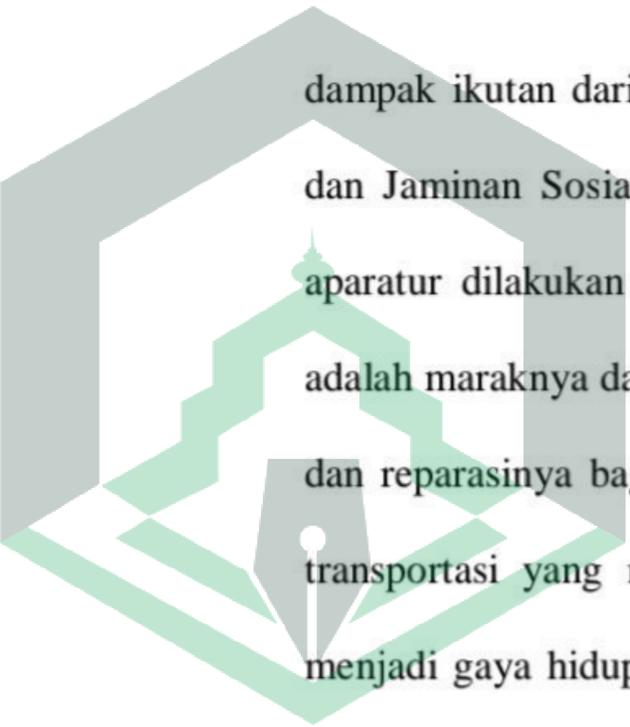
Menjadi Salah Satu Kota Pelayanan Jasa Terkemuka di kawasan Timur Indonesia

##### 2) Misi

- a) Menciptakan karakter warga kota Palopo sebagai pelayan jasa terbaik dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b) Menciptakan suasana kota Palopo sebagai kota yang damai aman dan tentram bagi kegiatan politik, ekonomi, social budaya, agama, pertahanan, dan keamanan dalam menunjang keutuhan Negara.

#### d. Kondisi Perekonomian Kota Palopo

Kota Palopo sebagai pintu utama masuknya barang dan jasa dari dan ke wilayah lain yang ada di provinsi Sulawesi selatan, baik itu regional maupun nasional. Transaksi perdagangan menjadi hidup sebagai akibat



dampak ikutan dari belanja kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang dimana belanja pemerintahan dan belanja aparatur dilakukan dikota ini. Adapun fenomena menarik yang ditemukan adalah maraknya dan tingginya sumbangan perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya bagi perekonomian di Kota Palopo. Selain kebutuhan akan transportasi yang memadai, kepemilikan sepeda motor juga diduga telah menjadi gaya hidup bagi Sebagian masyarakat di Kota Palopo. Berdasarkan data UPTB Pendapatan Kota Palopo di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka jumlah kendaraan bermotor pribadi Kota Palopo tahun 2017 adalah 21.253 unit (12,25%) dan kendaraan roda empat sebanyak 4.292 unit ( 4,29%). Jika dibandingkan jumlah penduduk kota palopo tahun 2017, maka kepemilikan kendaraan roda dua di kota palopo cukup tinggi, yaitu 1 kendaraan bermotor roda dua 3,9 orang atau hampir setiap rumah tangga memiliki kendaraan roda dua. Fenomena ini tentunya dapat berdampak pada ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, jika tidak dikelola dengan baik

Secara keseluruhan perekonomian di Kota Palopo didominasi oleh aktivitas-aktivitas jasa dan perdagangan. Berdasarkan struktur ekonomi maka terdapat 5 aktivitas-aktivitas jasa perdagangan yang utama yakni :

- 1) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- 2) Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan sepeda motor
- 3) Transportasi dan Pergudangan
- 4) Informasi dan Keuangan

### 5) Jasa Keuangan dan Asuransi

Yang secara keseluruhan menyumbang sebanyak 51,43% dari PDRB Kota Palopo. Beberapa aktivitas menunjang menunjang Kota Palopo sebagai kota jasa, juga terlihat dari kontribusi jasa Pendidikan, jasa perusahaan, jasa Kesehatan dan kegiatan social dan jasa lainnya, yang mencapai 10,26% dari total PDRB. Hal ini memberikan harapan untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik bagi aktivitas jasa ke depan. Jika mengamati struktur ekonomi Kota Palopo tahun 2017 yang cenderung dinamis, maka trend struktur ekonomi tahun 2018 dipperkirakan tidak berubah jauh dari kondisi tahun 2017, dengan aktivitas-aktivitas jasa dan perdagangan.

#### e. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo

Pertumbuhan suatu daerah di ukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya di atas harga konstan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indicator yang biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Salah satu indikator yang umumnya digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk menganalisis pembangunan ekonomi di suatu daerah digunakan ukuran pertumbuhan Ekonomi. Proses pembangunan ekonomi biasanya diikuti dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi di wilayah yang bersangkutan.

Pada penelitian ini mempunyai data lengkap tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 9 sektor pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun yakni tahun 2011 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2021 (dalam juta rupiah)

Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB
2010	2.913.050	-
2011	3.328.322	14%
2012	3.690.917	11%
2013	4.181.226	13%
2014	4.748.586	14%
2015	5.351.285	13%
2016	5.886.518	10%
2017	6.514.939	11%
2018	7.285.142	12%
2019	7.942.481	9%
2020	8.025.290	1%
2021	8.714.312	9%

Sumber : BPS Kota Palopo

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa PDRB pada tahun 2012 ke tahun 2013 meningkat sebesar sebesar 13% dan kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan hanya 9 % dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018.

Tabel 4.2 Belanja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2010-2021

Tahun	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
2010	Rp 221.894.100.476,00	Rp 161.769.485.639,00
2011	Rp 267.656.811.446,00	Rp 230.746.646.591,00
2012	Rp 302.918.650.833,00	Rp 222.853.409.165,00
2013	Rp 322.376.106.768,00	Rp 278.100.474.282,00
2014	Rp 372.994.344.151,00	Rp 324.803.534.545,00
2015	Rp 400.562.664.251,00	Rp 486.737.135.447,00
2016	Rp 429.944.381.674,00	Rp 719.186.393.030,00
2017	Rp 364.178.985.490,00	Rp 651.615.212.524,00
2018	Rp 458.151.129.700,00	Rp 537.284.188.500,00
2019	Rp 414.163.999.004,90	Rp 527.594.426.622,45
2020	Rp 727.073.776.201,30	Rp 207.967.903.780,89
2021	Rp 728.788.602.160,19	Rp 206.729.333.093,93

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo

Data tersebut pada tahun 2016, belanja langsung mempunyai nilai sebesar 86,97%, kemudian dalam satu tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 sebesar 97,31% , sedangkan pada belanja tidak langsung pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 97,59% kemudian pada beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yakni pada tahun 2020 sebesar 95,62%.

## 2. Analisis Data

### a. Pengujian Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 4.3 Uji Normalitas  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	782210.6695
		.0136
Most Extreme Differences	Absolute	.200
	Positive	.200
	Negative	-.164
Test Statistic		.200
Asymp. Sig. (2-tailed)		.198 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan  $0,198 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi dapat ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Pengujian dalam multikolinearitas dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) harus berada di bawah nilai 10 dan dengan melihat nilai Tolerance harus berada di atas 10. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2579896.456		2.618	.028		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.039E-6	.634	2.820	.020	.915	1.093
	BELANJA LANGSUNG	2.607E-6	.280	1.243	.245	.915	1.093

a. Dependent Variable: PDRB

Pada tabel tersebut, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10, antar lain untuk nilai VIF variabel Belanja Tidak Langsung (X1) sebesar 1.093 dan variabel Belanja Langsung (X2) sebesar 1.093. Selain itu, semua variabel bebas memiliki nilai Tolerance > 0.10 yaitu untuk variabel bebas Belanja Tidak Langsung (X1) memiliki 0.915 dan variabel Belanja Langsung memiliki nilai 0.915. Dengan melihat hasil nilai VIF yaitu < 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0.10. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melakukan uji Glejser dengan menggunakan residual absolut (resabs). Apabila nilai probabilitasnya >  $\alpha = 0.05$ , maka data tidak terkena heteroskedastisitas atau bersifat

homogen. Namun, jika nilai probabilitasnya  $< \alpha = 0.05$ , maka data mengalami gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan pengujian menggunakan uji glejser, dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1801931.61	273475.801		6.589	.000
		6				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-1.643E-6	.000	-.683	-2.765	.022
	BELANJA LANGSUNG	-1.566E-7	.000	-.066	-.269	.794

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel tersebut, maka dapat dilihat bahwa untuk variabel Belanja Tidak Langsung (X1) diperoleh nilai probabilitasnya sebesar 0,022 lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ . Sedangkan untuk variabel Belanja Langsung (X2) diperoleh nilai probabilitasnya sebesar 0,794 lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

#### 4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini

timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya, selain itu yaitu adanya kelembapan, bias spesifikasi model kasus variabel yang tidak dimasukkan, adanya fenomena alaba-laba manipulasi data, dan yang terakhir yaitu adanya kelembapan waktu. Berikut hasil uji nya:

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.764 <sup>a</sup>	.584	.491	1418631.94555	1.799

a. Predictors: (Constant), BELANJA LANGSUNG, BELANJA TIDAK LANGSUNG

b. Dependent Variable: PDRB

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada Tabel 4.4 dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW-Test) dengan jumlah variabel independen (k) sebanyak 2 variabel, dengan jumlah observasi (n) sebanyak 10 dan dengan  $\alpha = 5\%$  sehingga diperoleh nilai durbin watson lebih besar dari batas atas (du) atau  $1.799 > 1.6413$  dan lebih kecil dengan batas bawah (4-dl) sebesar 3,3028, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif untuk persamaan pertama.

#### b. Hasil Persamaan Regresi

Pada penelitian ini penulis menganalisis pengaruh belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo tahun 2010-2021. Hasil persamaan regresi berganda menggunakan SPSS versi 25.0 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Hasil Model Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	2579896.456	985405.687		2.618	.028
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.039E-6	.000	.634	2.820	.020
	BELANJA LANGSUNG	2.607E-6	.000	.280	1.243	.245

a. Dependent Variable: PDRB

Dari tabel tersebut dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2579 + 6.039X_1 + 2.607 X_2 + e$$

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 2579 menunjukkan bahwa jika variabel belanja tidak langsung dan belanja langsung bernilai nol maka nilai variabel pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 2579 nilai satuan.
- 2) Koefisien regresi untuk belanja tidak langsung yaitu sebesar 6.039 menunjukkan bahwa jika belanja tidak langsung meningkat Rp.. 1000, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat sebesar 6.039 satuan dengan menganggap peubah penjelas lainnya konstan.
- 3) Koefisien regresi untuk belanja tidak langsung yaitu sebesar 2.607 menunjukkan bahwa jika belanja tidak langsung meningkat Rp. 1000, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat sebesar 2.607 satuan dengan menganggap peubah penjelas lainnya konstan.

## c. Uji Hipotesis

## 1) Hasil Uji t

Uji signifikansi terhadap masing-masing koefisien regresi diperlukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, yaitu pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 4.7 Hasil Uji t

Model		Coefficients <sup>a</sup>				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2579896.45	985405.687		2.618	.028
		6				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.039E-6	.000	.634	2.820	.020
	BELANJA LANGSUNG	2.607E-6	.000	.280	1.243	.245

a. Dependent Variable: PDRB

Dari tabel tersebut menunjukkan nilai t hitung variabel X1 sebesar 2.820, sementara nilai t tabel sebesar 2.228 yang berarti bahwa nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel ( $2.820 > 2.228$ ) serta nilai signifikansinya sebesar 0,02 lebih kecil dari 0.05 ( $0,02 < 0,05$ ) sehingga menunjukkan bahwa belanja tidak langsung secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1.243 dimana t hitung  $>$  t tabel ( $1.243 < 2.228$ ) dengan nilai signifikansi

untuk variabel belanja langsung sebesar 0.245. Nilai signifikansi untuk variabel belanja langsung lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$  ( $0.245 > 0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa belanja langsung secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 2) Uji F

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 4.8 Hasil Uji F

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2537977571925 3.207	2	126898878596 26.604	6.305	.001 <sup>b</sup>
	Residual	1811264937234 6.880	9	201251659692 7.431		
	Total	4349242509160 0.086	11			

a. Dependent Variable: PDRB

b. Predictors: (Constant), BELANJA LANGSUNG, BELANJA TIDAK LANGSUNG

Merujuk pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 6.305 dan nilai F tabel diperoleh sebesar 4,10. Dengan demikian nilai Fhitung > F tabel ( $6.305 > 4.10$ ) jika dilihat dari nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,01 lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0,01 < 0.05$ ) sehingga kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara variabel belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 3) Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan besarnya kontribusi atau pengaruh variabel independen belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Besarnya koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.764 <sup>a</sup>	.584	.491	1418631.946

a. Predictors: (Constant), BELANJA LANGSUNG, BELANJA TIDAK LANGSUNG

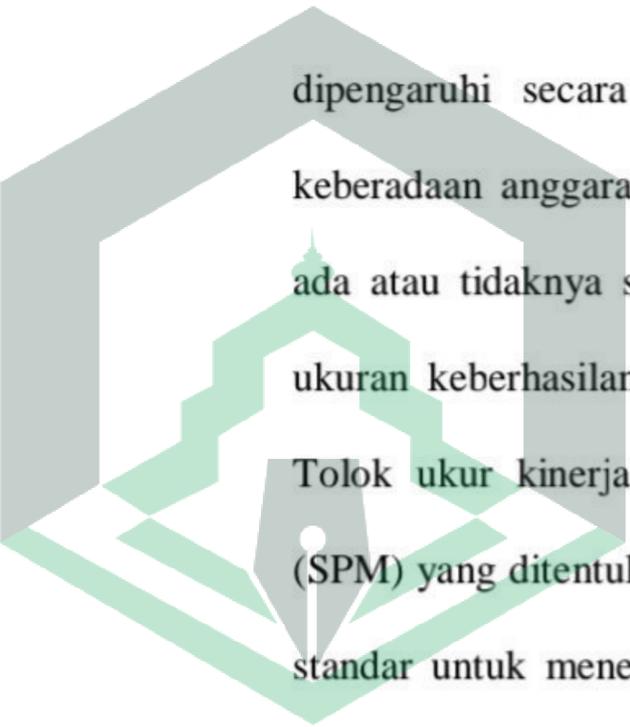
Berdasarkan tabel tersebut di peroleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.491 tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung memiliki kontribusi pada variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 49,1 % selama periode 2010-2021. Sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Tidak Langsung merupakan Belanja yang dimana tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi. Contohnya: Belanja Pegawai: Gaji (Mau kerja ataupun tidak kerja tetap diterima, sehingga tidak ada produktivitas).<sup>51</sup> Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak

<sup>51</sup> Andi, "Perbedaan Belanja Daerah yaitu Belanja Pegawai Langsung dan Tidak Langsung", 09/12/2015, [https://brainly.co.id/tugas/4623544#:~:text=perbedaan%20belanja%20langsung%20dan%20belanja,dengan%20produktivitas%20atau%20tujuan%20organisasi.\(Diakses pada: 02/01/2022\)](https://brainly.co.id/tugas/4623544#:~:text=perbedaan%20belanja%20langsung%20dan%20belanja,dengan%20produktivitas%20atau%20tujuan%20organisasi.(Diakses pada: 02/01/2022))



dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jadi keberadaan anggaran belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja perangkat daerah. Tolok ukur kinerja ditetapkan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditentukan oleh masing-masing daerah. Standar biaya merupakan standar untuk menentukan kebutuhan pengeluaran daerah. Indikator belanja tidak langsung yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Dorongan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak terduga.

Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 2.820, sementara nilai  $t$  tabel sebesar 2.228 yang berarti bahwa nilai  $t$  hitung lebih besar dari pada nilai  $t$  tabel ( $2.820 > 2.228$ ) serta nilai signifikansinya sebesar 0.020 lebih kecil dari 0.05 ( $0,02 < 0,05$ ) sehingga menunjukkan bahwa belanja tidak langsung secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo Tahun 2010-2021.

Untuk belanja tidak langsung tidak berdampak langsung terhadap masyarakat, namun dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung melalui alokasi untuk dianggarkan untuk hibah, social dan lain-lain yang secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Mas'ud et.al yang menunjukkan bahwa belanja tidak langsung berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan<sup>52</sup>

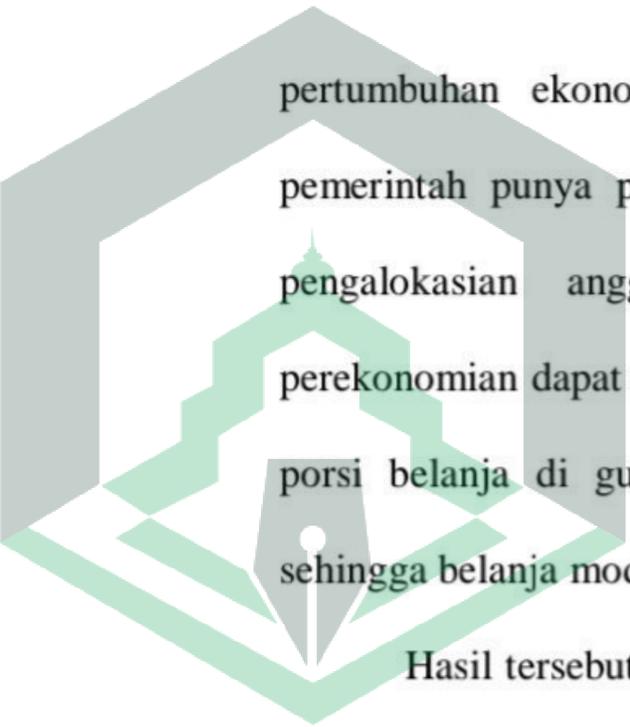
## 2. Pengaruh Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan di bagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal..

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1.243 dimana  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ( $1.243 < 2.228$ ) dengan nilai signifikansi untuk variabel belanja langsung sebesar 0.245. Nilai signifikansi untuk variabel belanja langsung lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$  ( $0.245 > 0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa belanja langsung secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo Tahun 2010-2021.

Hal ini memberi indikasi bahwa alokasi anggaran belanja langsung pemerintah belum banyak memberi pengaruh terhadap peningkatan

<sup>52</sup> Rahmad Mas'ud, Adi Wijaya, and Irwan Gani. "Pengaruh investasi dan belanja langsung serta belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja." *INOVASI* 17.2 (2021): 311-319.



pertumbuhan ekonomi padahal melalui alokasi belanja langsung inilah pemerintah punya peran besar untuk meningkatkan perekonomian melalui pengalokasian anggaran pembangunan atau infrastruktur agar laju perekonomian dapat meningkat. Hal ini dapat dipahami bahwa sebagian besar porsi belanja di gunakan untuk belanja pegawai dan pengadaan barang sehingga belanja modal atau belanja pembangunan sangat kecil porsinya.

Hasil tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Frits Junior hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel belanja langsung tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.<sup>53</sup>

### **3. Pengaruh belanja tidak langsung dan belanja langsung secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi**

Apabila dua alokasi anggaran ini digabungkan ternyata memberikan hasil yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada hasil uji F, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 6.305 dan nilai F tabel diperoleh sebesar 4.10. Dengan demikian nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $6.305 > 4.10$ ) jika dilihat dari nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,01 lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0,01 < 0.05$ ) sehingga kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara variabel Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2010-2021.

Hasil penelitian ini telah didukung oleh teori Keynes dengan rumusan:

---

<sup>53</sup> Frits Junior Kaontole, Debby Ch Rotinsulu, And Steeva YL Tumangkeng. "Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19.03 (2019).

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah yang dialokasikan sebagai belanja daerah yang disimbolkan sebagai G berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang disimbolkan sebagai Y. Kedua variabel bebas sebagaimana diuraikan tersebut secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial belanja langsung tidak signifikan memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja tidak langsung signifikan dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berfluktuasi selama 12 Tahun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan tersebut sehingga kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara parsial belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo Tahun 2010-2021. Hal tersebut dilihat dengan nilai t hitung sebesar 2.820, sementara nilai t tabel sebesar 2.228 yang berarti bahwa nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel ( $2.820 > 2.228$ ) serta nilai signifikansinya sebesar 0.020 lebih kecil dari 0.05 atau  $0,02 < 0,05$ .
2. Secara parsial belanja langsung tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kota Palopo Tahun 2010-2021. Hal tersebut dilihat dengan nilai t hitung sebesar 1.243 dimana t hitung  $>$  t tabel ( $1.243 < 2.228$ ) dengan nilai signifikansi untuk variabel belanja langsung sebesar 0.245. Nilai signifikansi untuk variabel belanja langsung lebih besar dari tingkat signifikansi  $0.245 > 0.05$ .
3. Secara simultan antara variabel belanja tidak langsung dan belanja langsung terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2010-2021. Hal tersebut dilihat dengan nilai nilai F hitung sebesar 6.305 dan nilai F tabel diperoleh sebesar 4,10. Dengan demikian nilai Fhitung  $>$  Ftabel (6.305

> 4.10) jika dilihat dari nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,01 lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0,01 < 0.05$ )

### **B. Saran**

Saran bagi pemerintah yaitu disarankan untuk dapat membuat kebijakan yang mengalokasikan belanja daerah (belanja tidak langsung dan belanja langsung) secara proporsional antara belanja rutin dengan belanja pembangunan yang lebih memihak kepentingan publik sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo.

Dengan memperhatikan keterbatasan yang ada, maka bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel yang mendukung atau yang lebih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi agar terlihat lebih besar pengaruhnya dari hasil penelitian sebelumnya

## DAFTAR PUSTAKA

Andi, "Perbedaan Belanja Daerah yaitu Belanja Pegawai Langsung dan Tidak Langsung", 09/12/2015, <https://brainly.co.id/tugas/4623544#:~:text=perbedaan%20belanja%20langsung%20dan%20belanja,dengan%20produktivitas%20atau%20tujuan%20organisasi>.

An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2018.

Aqmarina, Fauziah, and Imahda Khoiri Furqon. "Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19." (2020).

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo, *Klasifikasi Belanja Daerah*, Palopo: BKAD, 2019

Caroline, *Metode Kuantitatif*. Jakarta: Media Sahabat Cendekia, 2019

Chamdani, Moch. "Analisis Pengaruh Belanja Daerah (Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tangerang Tahun 2008–2014." *Ekonomi Bisnis* 24.1 (2018): 34-54.

Darwis, Erstelita Tria Ramadhani, "Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Akuntansi* VOL. 3, (2019):6

Dauhan, Jory S., Josep B. Kalangi, and Krest C. Tolosang. "Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2017." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20.01 (2020).

Desly, Teddy, Veckie A, Rumat, Debby Ch. Rotinsulu, "Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung," *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* VOL. 18 (2018): Hal. 4, Doi: <https://doi.org/10.35794/jpekd.12793.18.2.2016>

Ervani, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Majalah Ilmiah UNIKOM* VOL.7, (2018)

Fonna, Nurdianita. *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*. Jakarta: Guepedia, 2019.

Gahung, *Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung*, Edisi:1. Jakarta:Pustaka Populer, 2019

Ghazali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* Cetakan Ke-7, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018

Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. (Jakarta : Salemba Empat. 2017

Halim, Ahmad, *Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung*, Edisi:4 Surabaya:Pustaka Populer, 2018

Janie, Dyah Nirmala Arum, *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS*, Semarang: Semarang University Press, 2018

Juniawan, Made Ari, and Ni Putu Santi Suryantini. *Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali*. Diss. Udayana University, 2018

Kaontole, Frits Junior, Debby Ch Rotinsulu, And Steeva YL Tumangkeng. "Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19.03 (2019).

Kusumasari, Bevaola, *Akuntabilitas*, Edisi 3. Jakarta: LAN, 2019

Lucas, Robert, *Teori Pertumbuhan Endogen*, Edisi:2. Yogyakarta:Balai Pustaka, 2018

Mas`ud, Rahmad, Adi Wijaya, and Irwan Gani. "Pengaruh investasi dan belanja langsung serta belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja." *INOVASI* 17.2 (2021): 311-319.

Maulida, Akhri Dian Suci, and Muhammad Nasir. "Analisis Peranan Sub Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan* 3.4 (2018): 687-695.

Muttaqin, Rizal,. "Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam." *Maro* 1.2 (2018): 117-122.

Purba, Bonaraja, et al. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021

Sudirman, and M. Alhudhori. "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi." *EKONOMIS: Journal of Economics and Business* 2.1 (2018): 81-91.



Syaiful, "Pengertian dan Perlakuan Kutansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan," *Jurnal Akuntansi* VOL. 6, (2018)

Unaradjan, Dominikus Dolet. *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: Unika Atma Jaya Jakarta, 2019

Wati, Lina Asmara, and Mimit Primyastanto. *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern: Teori dan Aplikasinya*. Bandung: Universitas Brawijaya Press, 2018

Wisnujati, Nugrahini Susantinah, *Dasar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2022



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### Data PDRB Kota Palopo

Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB
2010	2.913.050	-
2011	3.328.322	14%
2012	3.690.917	11%
2013	4.181.226	13%
2014	4.748.586	14%
2015	5.351.285	13%
2016	5.886.518	10%
2017	6.514.939	11%
2018	7.285.142	12%
2019	7.942.481	9%
2020	8.025.290	1%
2021	8.714.312	9%

### Data Belanja Tidak Langsung Dan Langsung Kota Palopo

Tahun	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG	
2010	Rp	221.894.100.476,00	Rp	161.769.485.639,00
2011	Rp	267.656.811.446,00	Rp	230.746.646.591,00
2012	Rp	302.918.650.833,00	Rp	222.853.409.165,00
2013	Rp	322.376.106.768,00	Rp	278.100.474.282,00
2014	Rp	372.994.344.151,00	Rp	324.803.534.545,00
2015	Rp	400.562.664.251,00	Rp	486.737.135.447,00
2016	Rp	429.944.381.674,00	Rp	719.186.393.030,00
2017	Rp	364.178.985.490,00	Rp	651.615.212.524,00
2018	Rp	458.151.129.700,00	Rp	537.284.188.500,00
2019	Rp	414.163.999.004,90	Rp	527.594.426.622,45
2020	Rp	727.073.776.201,30	Rp	207.967.903.780,89
2021	Rp	728.788.602.160,19	Rp	206.729.333.093,93

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	782210.66950136
Most Extreme Differences	Absolute	.200
	Positive	.200
	Negative	-.164
Test Statistic		.200
Asymp. Sig. (2-tailed)		.198 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2579896.456	985405.687		2.618	.028		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.039E-6	.000	.634	2.820	.020	.915	1.093
	BELANJA LANGSUNG	2.607E-6	.000	.280	1.243	.245	.915	1.093

a. Dependent Variable: PDRB

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2579896.456	985405.687		2.618	.028
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.039E-6	.000	.634	2.820	.020
	BELANJA LANGSUNG	2.607E-6	.000	.280	1.243	.245

a. Dependent Variable: PDRB

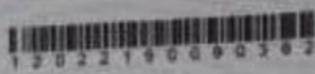
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25379775719253. 207	2	12689887859626. 604	6.305	.001 <sup>b</sup>
	Residual	18112649372346. 880	9	2012516596927.4 31		
	Total	43492425091600. 086	11			

a. Dependent Variable: PDRB

b. Predictors: (Constant), BELANJA LANGSUNG, BELANJA TIDAK LANGSUNG

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.764 <sup>a</sup>	.584	.491	1418631.946

a. Predictors: (Constant), BELANJA LANGSUNG, BELANJA TIDAK LANGSUNG



1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 0 3 6 2



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 326048



ASLI

**IZIN PENELITIAN**  
 NOMOR : 362/PP/DPMP/IV/2022

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Optis Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penelitian Gural Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Merjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Merjadi Urusan Pemerintah Yang Di berikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama	: ALFIRA ZALZABILA
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Latamabelling No. 50 Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 18 0401 0040

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian	: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 13 April 2022 s.d. 13 Mei 2022

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
 Pada tanggal : 14 April 2022  
 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



**SUSIHA SH**  
 Pangkat / Penata Tk.I  
 N.P. 19720215 200604 2 016



**Terbusan**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sul
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWD
4. Kapres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo

## RIWAYAT HIDUP



**ALFIRA ZALZABILA**, lahir di Palopo pada tanggal 29 Oktober 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Ismil dan ibu Darnawati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jln. Latamacelling No. 59, Kelurahan

Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 81 Langkanae Kota Palopo. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP, penulis menjadi salah satu pengurus pramuka. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kota Palopo dan selesai pada tahun 2018. Kemudian pada tahun yang sama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo dan Penulis memilih program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



# KARTU KONTROL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Bili Kota Palopo 91914 Telp: 085243175771  
 Email: [info@iaipalopo.ac.id](mailto:info@iaipalopo.ac.id); Website: [www.iaipalopo.ac.id/](http://www.iaipalopo.ac.id/)

## KARTU KONTROL SEMINAR HASIL SKRIPSI

Nama : ALFIRA ZALZABILA  
 NIM : 18.0401.0040  
 Prodi : EKONOMI SYARIAH

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	Selasa 21/04/2022	ARFIKA	EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO	<i>[Signature]</i>	
2	Rabu 27/04/2022	ULFIANI DWI YANTI MAPPA	REBUNGAN TINGKAT URHANSASI DAN TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KOTA PALOPO	<i>[Signature]</i>	
3	Senin 13/06/2022	HARMINA JANUR	REBUNGAN ANTARA PPR MASYARAKAT & FAT PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN LUWU (Studi Di Desa Kadang-kalong, Kecamatan Bajo Base)	<i>[Signature]</i>	
4	Kamis 16/06/2022	AHDLI KARIM	PENGARUH PELAYANAN SAMSAT PALOPO DAN MINAT MASYARAKAT UNTUK TAAT MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALOPO	<i>[Signature]</i>	
5	Kamis 30/06/2022	NUR AINUN	ANALISIS KEBERADAAN PERUSAHAAN KELAPA SAWIT DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI DESA LAGEGO KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR)	<i>[Signature]</i>	
6	Senin 08/08/2022	MURHALIMA	PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA (DESA TAMPA KEC. POWANG SELATAN KABUPATEN LUWU)	<i>[Signature]</i>	
7	Kamis 11/08/2022	ROSILINA	ANALISIS EFEKTIVITAS KETEPATAN WAKTU PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PEMULIHAN PEREKONOMIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN LUWU	<i>[Signature]</i>	
8	Kamis 15/08/2022	SAKINAH HASKAR	ANALISIS EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP KETANAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA PADANG TULU KECAMATAN SUPON KABUPATEN LUWU	<i>[Signature]</i>	
9	Selasa 27/09/2022	Nyara Ikayanti	PENGARUH INDEKS PEMERANGKUAN PEMERINTAH DAN JUMLAH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI LUWU RAYA	<i>[Signature]</i>	
10	Rabu 28/08/2022	Andi Isni Yanti	ANALISIS PROFITABILITAS USAHA TANI CENGKEH TERHADAP TINGKAT KESJAHTERAAN PETANI CENGKEH DI KECAMATAN LAROMPONG	<i>[Signature]</i>	

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

*[Signature]*  
 Dr. Takdir, SH, MH  
 NIP.197907242003121000

- NB:
- Kartu ini dibawa setiap mengikuti ujian
  - Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 5 kali seminar sebelum seminar hasil.

# BUKU BIMBINGAN

Buku Kontrol Penulisan Skripsi... 24

LEMBAR KONSULTASI SETELAH URAN  
SEMINAR HASIL PENELITIAN

Konsultasi No. 2 Hari Rabu Tanggal 3/10/2023

Materi Konsultasi

No.	Urutan
1	Alasan masuk penelitian : (pilih salah satu)
2	Definisi masalah, pilih salah satu tidak
3	Kerangka pikir tidak salah pilih jawaban betul
4	Populasi dan sampel (tentukan asal data)
5	Daerah yang linear terganggu tidak ada pengganggu
6	Nilai signifikansi > 0.05 atau < 0.05
7	
8	
9	
10	

Pengisi 1.

M. Dharma Pratomo, S.Pd., M.Pd., M.Si.  
NIP. 1973090120081001005

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Buku Kontrol Penulisan Skripsi... 25

LEMBAR KONSULTASI SETELAH URAN  
SEMINAR HASIL PENELITIAN

Konsultasi No. 2 Hari Rabu Tanggal 3/10/2023

Materi Konsultasi

No.	Urutan
1	Dasar/teori/latar belakang (1-2-3, yang sudah ada)
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pengisi 2.

M. Dharma Pratomo, S.Pd., M.Pd., M.Si.  
NIP. 1973090120081001005

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Buku Kontrol Penulisan Skripsi... 26

LEMBAR KONSULTASI SETELAH URAN  
SEMINAR HASIL PENELITIAN

Konsultasi No. Hari Senin Tanggal 05/10/2023

Materi Konsultasi

No.	Urutan
1	Alasan tidak salah ada alasan
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pengisi 3.

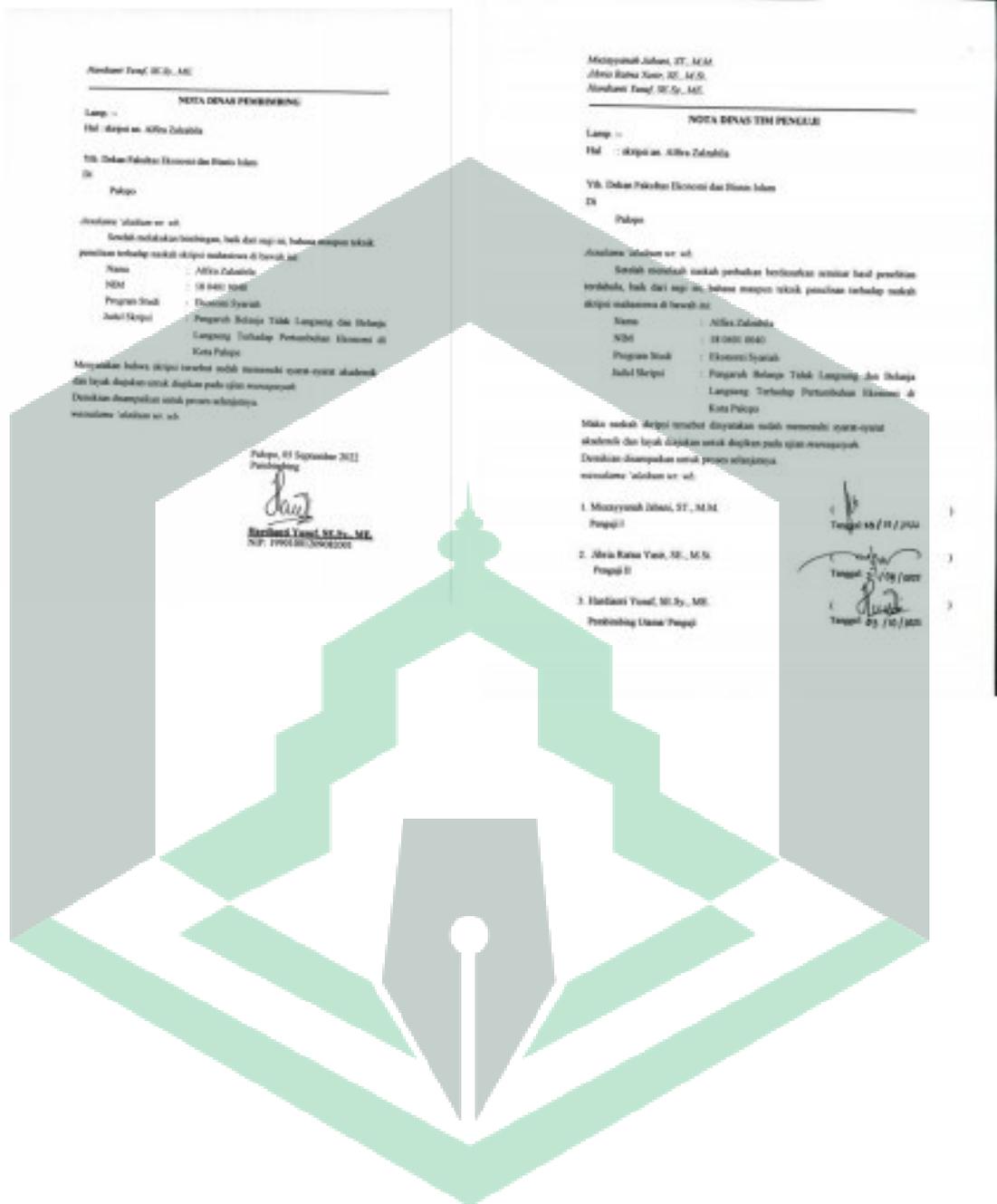
M. Dharma Pratomo, S.Pd., M.Pd., M.Si.  
NIP. 1973090120081001005

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

## PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PERSETUJUAN PENGUJI

BALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	BALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
<p>Berikut memuat dengan skema skripsi berjudul: <b>Pengaruh Belajar Tidak Lengkap dan Belajar Lengkap Terhadap Perilaku Ekonomi &amp; Kita Pelajar</b></p> <p>Yang ditulis oleh:</p> <p>Nama : <b>Affix Zababla</b> NIM : <b>18 0401 0040</b> Fakultas : <b>Ekonomi Dan Bisnis Islam</b> Program Studi : <b>Ekonomi Syariah</b></p> <p>Mengajukan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diajukan pada ujian mawas-mawas.</p> <p>Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.</p> <p>Paling 01 September 2022 Pembimbing  <b>Hardiani Yanti, SE., Sp. M.</b> NIP. 199010012019082001</p>	<p>Skripsi berjudul <b>Pengaruh Belajar Tidak Lengkap dan Belajar Lengkap Terhadap Perilaku Ekonomi &amp; Kita Pelajar Oleh Affix Zababla Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0401 0040</b>, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diajukan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 01 September 2022 bertepatan dengan 04 Safar 1444 H telah dipertahankan sesuai ratapan dan persetujuan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian mawas-mawas.</p> <p><b>TIM PENGUJI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Taidi, ST., MEd. (  ) Ketua Sidang Penguji Tanggal: 05 Oktober 2022</li><li>2. Dr. Mub. Fauzan Abdulkah, S.EI., M.A. (  ) Sekretaris Sidang Penguji Tanggal: 03 Oktober 2022</li><li>3. Muzayyannah Ishani, ST., M.M. (  ) Pengaji I Tanggal: 03 Oktober 2022</li><li>4. Ibtisama Ratu Yanti, SE., M.M. (  ) Pengaji II Tanggal: 21 September 2022</li><li>5. Hardiani Yanti, SE.Sy., MEd. (  ) Pembimbing Utama Penguji Tanggal: 05 Oktober 2022</li></ol>

# NOTA DINAS PEMBIMBING DAN NOTA DINAS PENGUJI



Hardian Yusuf, S.Pd., MEd

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. -

Hal. - delapan (8) Alinea Zuhdi

YB. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Anakarya, selatun sr. sd

Berikut melampirkan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap makalah sebagai mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alinea Zuhdi  
NIM : 18 0401 1040  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jalur Masuk : Perguruan Belajar TMM Langgeng dan Belajar Langgeng Terhadap Perkembangan Ekonomi di Kota Palopo

Mengingat bahwa sebagai dosen sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak dijadikan untuk diujikan pada ujian wawancara. Demikian disampaikan untuk prasyaratnya. Wassalamu 'alaikum wa. ah

Palopo, 01 September 2021

Pembimbing

**Hardian Yusuf, S.Pd., MEd**  
NIP. 196108120062001

Muhammad Ihsani, ST., ACM

Jibin Ratus Yusr, SE., M.Si

Hardian Yusuf, S.Pd., MEd

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. -

Hal. - delapan (8) Alinea Zuhdi

YB. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Anakarya, selatun sr. sd

Berikut melampirkan makalah berdasarkan arahan hasil penelitian terhadap, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap makalah sebagai mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alinea Zuhdi  
NIM : 18 0401 1040  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jalur Masuk : Perguruan Belajar TMM Langgeng dan Belajar Langgeng Terhadap Perkembangan Ekonomi di Kota Palopo

Maka sudah sebagai dosen sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak dijadikan untuk diujikan pada ujian wawancara. Demikian disampaikan untuk prasyaratnya. Wassalamu 'alaikum wa. ah

1. Muhammad Ihsani, ST., ACM  
Pengaji I
2. Jibin Ratus Yusr, SE., M.Si  
Pengaji II
3. Hardian Yusuf, S.Pd., MEd  
Pembimbing Utama Pengaji

Tanggal 18 / 09 / 2021

Tanggal 18 / 09 / 2021

Tanggal 21 / 09 / 2021

## SURAT KETERANGAN BEBAS MATAKULIAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI EKONOMI SYARIAH

Jalan Binti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771  
Email: [febi@iainpalopo.ac.id](mailto:febi@iainpalopo.ac.id); Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

### SURAT KETERANGAN

NOMOR: B069/In.19/FEBI.04/KS.02/EKS/02/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa (i) :

Nama : Alfira Zatzabila

NIM : 18 0401 0040

Program Studi : Ekonomi Syariah

benar telah mengikuti perkuliahan sesuai dengan kurikulum program studi ekonomi syariah dan dinyatakan bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I tahun akademik 2018/2019 s.d semester VII tahun akademik 2021/2022 berdasarkan data nilai prodi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 Februari 2022  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dr. Fasaha, M. El

# SURAT KETERANGAN MATRIKULASI

  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**إشهاد**

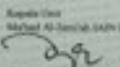
№: 100/PPT/SEK/ID AL-AMEN/18/IV/001

Diberikan kepada

**ALFIRA ZALZABILA**  
NIM : 18 0401 0040

Sebelum mengikuti Program Mu'had al-Jam'iah di Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Setelah mendapat Keterangan Matrikulasi ini terdapat data sesuai dengan peraturan yang berlaku  
Dibuatkan di Palopo pada tanggal Dua April Dua Ribu Sembilan Belas

Petugas  
  
Dr. Mansur Tahar, M.H.  
NIP. 19680503 199803 1 005

Kepala Unit  
Mu'had al-Jam'iah IAIN Palopo  
  
Dr. Mansur Tahar, M.H.  
NIP. 19680503 199803 1 005

*Dipindai dengan CamScanner*

  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**TRANSKRIP NILAI**  
MAHASISWA PROGRAM MU'HAD AL-JAM'IAH

NAMA : ALFIRA ZALZABILA  
NIM : 18 0401 0040  
KELOMPOK : EKIS B

NO	MATA KULIAH	SEMESTER	NILAI	
			ANGKA	HURUF
1	Ulumul Qur'an	I	90	B+
2	Pengamalan Sunnah	I	80	B-
3	Pengamalan Sunnah	II	87	A-
4	Metode Baca Tulis Al-Qur'an	II	87	A-
<b>JUMLAH</b>			344	
<b>RATA-RATA</b>			86,00	

Predikat Kelulusan : **Amat Baik / Baik / Cukup / Menengah**

Palopo, 2 April 2019

Kepala Unit  
Mu'had al-Jam'iah IAIN Palopo  
  
Dr. Mansur Tahar, M.H.  
NIP. 19680503 199803 1 005

*Dipindai dengan CamScanner*

# SURAT KET. MEMBACA & MENULIS AL-QUR'AN DARI PA



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**REPUBLIK INDONESIA** **INSTITUT**  
**AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**PALOP** **FAKULTAS EKONOMI DAN**  
**BISNIS ISLAM**  
Jl. Bittf Telo (0471) 22076 Balantala-Kota Palopo  
Email: iabi@iainpalopo.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, menenangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis al-Qur'an dengan

*kuifing/baik/lafidz \*coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.*

Nama : ALFIRA ZALZABILA

NIM : 18 0401 0040

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

30 Mei 2022

Mengetahui:

Ketua Prodi

  
Dr. Fathu, S.E.I., M.E.I.

Dosen Penguji

  
Iham, S.Ag., M.A.

## SERTIFIKASI OSCAR / PEMBAHARU





# SERTIFIKAT TOEFL

**UNIVERSAL ENGLISH**  
SK DIKNAS 421.9/1196/418.20/2020

**CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT**

This Certificate is Proudly Presented to:

**ALFIRA ZALZABILA**

Registration No. 4175/05/2022 Date of Birth Oct 29 2000 Place Palopo  
Gender Female Native Country Indonesia Native Language Indonesia  
Has achieved the following scores in the TOEFL:

**TOEFL**  
Test Of English as a Foreign Language

Listening Comprehension	48
Structure & Written Expression	47
Reading Comprehension	45
Total Score	460

Test Date : 18<sup>th</sup> of March 2023  
Valid Until : 18<sup>th</sup> of March 2024

Amir Pahrizanto, Lc., M.H.

Jalan Kemuning No.37 Desa Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri Kode Pos: 64212

**UNIVERSAL ENGLISH**

**THE CLASSIFICATION OF TOEFL RESULT  
TOEFL SCORES**

SCORE	CATEGORY	CEFR LEVEL
337 - 459	Elementary	A2
460 - 542	Low Intermediate	B1
543 - 626	Upper Intermediate	B2
627 - 677	Advance	C1

## KUITANSI PEMBAYARAN UKT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan BSI Kota Palopo 91914 Telpom/HP 085243175771  
Email: [foed@iaipalopo.ac.id](mailto:foed@iaipalopo.ac.id) Website: <http://iaipalopo.ac.id>

### SURATKETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Saepul, S.Ag., M.Pd.I  
NP : 19720715 200604 1 001  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha  
Unit Kerja : FEBI IAIPalopo

menyatakan bahwa:

Nama : ALIJUN ZALSAHUNA  
NIM : 16 0401000  
Semester/Prodi : IX / EBTIS  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Yang bersangkutan benar telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester I 2021/22.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 OKTOBER 2022  
an. Dekan  
Kepala Bagian Tata Usaha



Saepul, S.Ag., M.Pd.I  
NP19720715 200604 1001

